



# LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2023



[niasselatankab.go.id](http://niasselatankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja Tahun 2023 adalah pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Tahun Anggaran 2023.



Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi melalui masing-masing Perangkat Daerah dan wujud pertanggungjawaban kinerja dan transparansi kepada masyarakat Nias Selatan.

Secara umum, realisasi dan capaian kinerja telah memenuhi dan sesuai dengan rencana target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kinerja yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya. Dalam pencapaian kinerja yang sesuai target sangat dibutuhkan komitmen, kerjasama, koordinasi, dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak antara lain Aparatur Sipil Negara, masyarakat Nias Selatan, dunia usaha dan organisasi nirlaba.

Akhirnya diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Instansi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat bermanfaat dalam optimalisasi peran kelembagan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan

produktivitas kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Teluk Dalam, 28 Maret 2024

**BUPATI NIAS SELATAN,**  
  
**Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH.**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemda Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang harus dicapai targetnya. Rincian realisasi masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
<b>Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan</b>					
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik</b>					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	89,8	97,6%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP*	100%
		Nilai SAKIP	52	50,17*	96,4%
<b>Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas</b>					
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan</b>					
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	75%	94,29%	125%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	15%	11%	73%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	45%	39,78%	88%
		Persentase Rumah Tangga Yang	60%	58,54%	97%

		Menggunakan Listrik PLN			
		Rasio Rumah Layak Huni	0,150	0,1143	76%
<b>Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif</b>					
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing</b>					
<b>3</b>	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	57,01	57	100%
<b>4</b>	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	72	66,63	92%
<b>5</b>	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62,32	61,86	99,26%
<b>Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif</b>					
<b>Tujuan 4 : Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif</b>					
<b>6</b>	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam da warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,2	3,65	114%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	3,4	2,72	80%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	7,2	5,47	75%
<b>Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat</b>					
<b>Tujuan : Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan</b>					
<b>7</b>	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%	99,62%	99,62%

	Indeks Resiko Bencana (IRB)	190	190,52	99,7%
	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%
	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%

*Keterangan : \* (menggunakan data realisasi tahun 2022).*

Dari tabel diatas, hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang persentase capaiannya diatas 100% dan 9 (sembilan) indikator kinerja yang persentase capaiannya dibawah 100%. Namun secara keseluruhan, rata-rata persentase capaian dari 18 (delapan belas) indikator kinerja mencapai 108,51% atau capaian diatas 100%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan .....	2
C. Kondisi Umum Kabupaten Nias Selatan .....	4
D. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2023.....	7
E. Sistematika Penyajian.....	8
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	9
B. Indikator Kinerja Utama .....	16
C. Perjanjian Kinerja.....	22
D. Perencanaan Anggaran.....	26
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	30
B. Analisis Capaian Kinerja .....	32
C. Akuntabilitas Keuangan .....	118
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut merupakan bentuk akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja dapat dijadikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



## B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan berdiri pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian oleh Drs. Nabari Ginting, Msi.

### 2. Kondisi Geografis

Kabupaten Nias Selatan secara astronomis terletak pada  $0^{\circ} 33' 25''$  LS –  $1^{\circ} 4' 5''$  : U dan  $97^{\circ} 25' 59''$  –  $98^{\circ} 48' 29''$  BT. Letak geografis Kabupaten Nias Selatan di sebelah Barat pulau Sumatera dengan jarak  $\pm 92$  mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak  $\pm 120$  km dari Kota Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Dari gugusan pulau tersebut terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala ( $39,67 \text{ km}^2$ ), Pulau Tanah Masa ( $32,16 \text{ km}^2$ ), Pulau Telo ( $18 \text{ km}^2$ ) dan Pulau Pini ( $24,36 \text{ km}^2$ ).

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nias memiliki luas wilayah administrasi  $6.902.505 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 104 (seratus empat buah pulau, 18 (delapan belas) kecamatan yang kemudian pada tahun 2012 jumlah kecamatan

berkembang menjadi 35 kecamatan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 459 Desa. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 adalah 2.487,98 Km<sup>2</sup>. Sedangkan batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terbagi atas 35 Kecamatan, 459 Desa dan 2 Kelurahan.

Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan



### 3. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika

dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mencapai 360.531 jiwa. Tingkat Kepadatan penduduk rata-rata 160,16 jiwa/km<sup>2</sup> dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km<sup>2</sup>.

## C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Nias Selatan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah (Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.10\_45 Tahun 2019), terdiri dari:
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
  - 2) Bagian Hukum;
  - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 4) Bagian Kerjasama;
  - 5) Bagian Perekonomian;
  - 6) Bagian Sumber Daya Alam;
  - 7) Bagian Administrasi Pembangunan;
  - 8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 9) Bagian Umum;
  - 10) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
  - 11) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - 12) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat

- d. Badan Daerah, terdiri dari:
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
  - 3) Badan Kepegawaian Daerah;
  - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 6) Dinas Sosial;
  - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM;
  - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A;
  - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
  - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 13) Dinas Perhubungan;
  - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 15) Dinas Penanaman Modal dan P2TSP;
  - 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
  - 17) Dinas Perpustakaan;
  - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - 19) Dinas Pertanian; dan
  - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
  - 1) Kecamatan Teluk Dalam;
  - 2) Kecamatan Fanayama;
  - 3) Kecamatan Maniamolo;
  - 4) Kecamatan Aramo;
  - 5) Kecamatan Amandaraya;
  - 6) Kecamatan Lolowau;

- 7) Kecamatan Hilimegai;
- 8) Kecamatan Lolomatua;
- 9) Kecamatan Mazino;
- 10) Kecamatan Toma;
- 11) Kecamatan Lahusa;
- 12) Kecamatan Umbunasi;
- 13) Kecamatan Susua;
- 14) Kecamatan Mazo;
- 15) Kecamatan Pulau-pulau Batu;
- 16) Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
- 17) Kecamatan Hibala;
- 18) Kecamatan Ulunoyo;
- 19) Kecamatan Huruna;
- 20) Kecamatan O'ou;
- 21) Kecamatan Onohazumba;
- 22) Kecamatan Hilisalawa'ahe;
- 23) Kecamatan Ulususua;
- 24) Kecamatan Sidua'ori;
- 25) Kecamatan Somambawa;
- 26) Kecamatan Boronadu;
- 27) Kecamatan Simuk;
- 28) Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
- 29) Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;
- 30) Kecamatan Tanah Masa;
- 31) Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- 32) Kecamatan Onolalu;
- 33) Kecamatan Gomo;
- 34) Kecamatan Idanotae; dan
- 35) Kecamatan Uluidanotae.

## D. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dapat menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Lakip dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 mencakup hal-hal berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sekaligus bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023;
2. Aspek manajemen kerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan;

3. Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
5. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum diantaranya latar belakang, gambaran umum Kabupaten Nias Selatan, kondisi umum Kabupaten Nias Selatan, permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan LAKIP tahun 2023 dan Sistematika LAKIP Tahun 2023.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menguraikan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, Perencanaan Anggaran Tahun 2023 dan Perencanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NIAS SELATAN 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021, maka ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

#### **VISI :**

**“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- **“Nias Selatan Maju”** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **“Masyarakat Sejahtera”** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Misi sebagai berikut :



**MISI :**

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan penajaman terhadap Visi “***Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera***” dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan :**

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

**b. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :**

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan

**c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :**

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.

**d. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :**

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

**e. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :**

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Selanjutnya, di dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai hingga tahun 2026 yaitu :

1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
2. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan.

3. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
4. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif.
5. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan.

Untuk mendukung ketercapaian terhadap 5 (lima) tujuan diatas secara terukur dan nyata, maka ditetapkan juga sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan**

No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	-	C	C	CC	CC	B	B
		1.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi
				Nilai SAKIP	Predikat	C	C	B	B	B	B	B
				Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan		Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	54.36	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	75.74
		2.1.1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Persen	53	61	65	68	71	75	75
				Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55.72	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	76.47
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Rasio	49,55	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	52.04
				Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76.04	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	97.84

			Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0.048	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	0.059	
<b>3</b>	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	
		3.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	53.56	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56	60.56
		3.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	72.90	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28	75.28
		3.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	-	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	
<b>4</b>	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.61	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
		4.1.1	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1.04-2.22	2.22-3.40	3.40-4.00	4.00-4.45	4.45	4.45
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	3.64

5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan		Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
				Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	202	197	197	192	192	192
		5.1.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
				Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100	100	100	100

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 -2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Pada Indikator Kinerja Utama ini terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Target selama 5 (lima) tahun, definisi operasional/formulasi pengukuran kinerja, dan Perangkat Daerah Penanggungjawab. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026**

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab															
					2022	2023	2024	2025	2026																	
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C	CC	CC	B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Komponen Pengungkit</td> <td>60%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen perubahan (5%)</li> <li>b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%)</li> <li>c. Penataan dan penguatan organisasi (6%)</li> <li>d. Penataan tatakelola (5%)</li> <li>e. Penataan sistem manajemen SDM (15%)</li> <li>f. Penguatan Akuntabilitas (6%)</li> <li>g. Penguatan pengawasan (12%)</li> <li>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komponen Hasil</td> <td>40%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)</li> <li>b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)</li> <li>c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Bobot	Sub-Komponen	1	Komponen Pengungkit	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen perubahan (5%)</li> <li>b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%)</li> <li>c. Penataan dan penguatan organisasi (6%)</li> <li>d. Penataan tatakelola (5%)</li> <li>e. Penataan sistem manajemen SDM (15%)</li> <li>f. Penguatan Akuntabilitas (6%)</li> <li>g. Penguatan pengawasan (12%)</li> <li>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)</li> </ul>	2	Komponen Hasil	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)</li> <li>b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)</li> <li>c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)</li> </ul>	Total		100%		Sekretariat Daerah
		Komponen	Bobot	Sub-Komponen																						
1	Komponen Pengungkit	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen perubahan (5%)</li> <li>b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%)</li> <li>c. Penataan dan penguatan organisasi (6%)</li> <li>d. Penataan tatakelola (5%)</li> <li>e. Penataan sistem manajemen SDM (15%)</li> <li>f. Penguatan Akuntabilitas (6%)</li> <li>g. Penguatan pengawasan (12%)</li> <li>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)</li> </ul>																							
2	Komponen Hasil	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)</li> <li>b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)</li> <li>c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)</li> </ul>																							
Total		100%																								
	1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Ket: Unsur Pelayanan = prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, kenyamanan pelayanan</p>	Sekretariat Daerah															



No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
			Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	B		Sekretariat Daerah
			Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
2	Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan	Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	<i>Proxy</i> = Rata – rata dari lima indikator sasaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	61	65	68	71	75	$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yang dapat terlayani}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih}}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Rasio	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi yang dibangun}}{\text{Luas Daerah Irigasi Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	$\frac{RT_{PLN}}{RT} \times 100\%$  Ket: RT <sub>PLN</sub> = Jumlah rumah tangga yang	Sekretariat Daerah

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
										menggunakan listrik PLN RT = Jumlah Rumah Tangga	
			Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Seluruh Perangkat Daerah
		3.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>	Dinas Pendidikan
		3.1.2 Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Ket: AHH = Angka Harapan Hidup AHH<sub>min</sub> = 25; AHH<sub>maks</sub> = 85</p>	Dinas Kesehatan
		3.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	$\text{Indeks Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{Pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{min})}$	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
											Perizinan Terpadu Satu Pintu
4	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$  Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	Seluruh Perangkat Daerah
		4.1.1 Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1.04-2.22	2.22-3.40	3.40-4.00	4.00-4.45	4.45	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$  Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Pertanian	Dinas Pertanian
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$  Ket: PDRB atas dasar harga konstan T = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP = Kategori Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
			Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	197	197	192	192	$IRB = \frac{H \times V}{C}$  Ket: IRB = Indeks Resiko Bencana H = Indeks Bahaya (Hazard)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
										V = Indeks Kerentanan (Vulnerability) C = Indek Kapasitas (Capacity)	
		5.1.1 Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
			Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam Yang Berhasil Diselamatkan dan Dievakuasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Korban Bencana Alam}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2023 telah disesuaikan atau mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator	Target
<b>Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan</b>		
<b>1</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WDP
	Nilai SAKIP	62
<b>Misi 2 :Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas</b>		
<b>2</b> Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	53%
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	15%
	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	45%
	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	88%
	Rasio Rumah Layak Huni	0,150
<b>Misi 3 :Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif</b>		
<b>3</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	12
<b>4</b> Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat	Indeks Kesehatan	72

	kesehatan		
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62,32
Misi 4 :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif			
6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,2
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	3,4
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	7,2
Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	190
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%
		Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

Sumber data: RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 yang disusun dan ditandatangani oleh Bupati Nias Selatan pada Januari 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan dilakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja yakni :

1. Adanya perbaikan terhadap beberapa target kinerja yang telah ditetapkan pada Misi 1, contohnya Nilai SAKIP yang ditargetkan sebelumnya 62 dikurangi menjadi 52. Perubahan ini dilakukan didasari oleh dinamika

perkembangan implementasi SAKIP yang belum mampu memenuhi target pada perjanjian kinerja murni di awal tahun 2023. Perubahan tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.4

2. Adanya penyesuaian pada penetapan target indikator kinerja Opini BPK yang semula ditargetkan WDP, namun setelah diterbitkan Opini BPK pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendapatkan predikat WTP. Oleh karena target Opini BPK pada tahun anggaran 2023 diubah menjadi WTP.
3. Adanya penyesuaian atau perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan program dan kegiatan, dan perubahan pola kerja pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 dilaksanakan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dapat dilakukan apabila ada pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas target yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang signifikan.

**Tabel :Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis		Indikator	Target
<b>Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP
		Nilai SAKIP	52
<b>Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas</b>			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	75%

	daerah	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	15%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	45%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	60%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,150
<b>Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif</b>			
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	57,01
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	72
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62,32
<b>Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif</b>			
6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,2
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	3,4
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	7,2
<b>Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat</b>			
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	190
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%



	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
--	---	------

## D. PERENCANAAN ANGGARAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi melalui penetapan perjanjian kinerja murni tahun 2023, maka alokasi anggaran dan program pendukung Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nominal sebesar Rp **1.500.582,297.850** dan didukung oleh 87 program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023. Anggaran APBD tersebut mengalami perubahan menjadi Rp **1.592.005.031.775** sebagaimana dalam rincian anggaran dan program pada tabel berikut.

**Tabel: Perencanaan Anggaran Kabupaten Nias Selatan APBD Perubahan Tahun 2023**

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	532.713.067.446
2	Program Pengelolaan Pendidikan	119.522.903.000
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	127.895.943.577
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.753.000.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.052.974.508
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	7.513.746.312
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.218.991.719
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.090.268.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	12.783.849.786
10	Program Penyelenggaraan Jalan	89.781.317.877

11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.700.000.000
12	Program Pengembangan Perumahan	15.068.020
13	Program Kawasan Permukiman	341.348.700
15	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	552.184.400
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	70.165.000
17	Program Penanggulangan Bencana	105.350.000
18	Program Rehabilitasi Sosial	20.638.000
19	Program Penanganan Bencana	4.950.000
20	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	372.606.300
21	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	255.770.000
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	202.000.000
23	Program Pengembangan UMKM	510.000.000
24	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	145.830.000
25	Program Perlindungan Perempuan	2.578.000
26	program peningkatan kualitas keluarga	7.196.000
27	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2.181.600
28	Program Perlindungan Khusus Anak	9.972.000
29	Program Pengendalian Penduduk	3.629.895.400
30	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.135.690.000
31	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.980.000.400
33	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	859.308.479
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.707.357.177
35	Program Pengelolaan Persampahan	641.772.650
37	Program Administrasi Pemerintahan Desa	111.314.382
38	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.289.126
39	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	139.320.000
40	Program Pengelolaan Pelayaran	2.796.200.000
41	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	216.800.000
42	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.281.738.800
43	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.000.000

44	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000
45	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	149.824.600
46	Program Promosi Penanaman Modal	50.051.100
47	Program Pelayanan Penanaman Modal	50.000.000
48	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	532.100.000
49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	374.398.500
51	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	23.708.600
52	Program Pengembangan Kebudayaan	103.000.000
53	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	149.919.000
54	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	670.798.784
55	Program Pemasarana Pariwisata	5.515.172.393
56	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	715.075.716
57	Program Pembinaan Perpustakaan	79.834.800
58	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.423.745.843
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.002.631.364
60	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	46.750.592
61	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.051.529.244
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.620.070.475
63	Program Penyuluhan Pertanian	230.000.000
64	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	509.025.800
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	68.823.400
66	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	79.900.510
67	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23.084.668.126
68	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.304.867.769
69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.301.828.000
70	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	396.780.600
71	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	482.430.200
72	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	135.590.032
73	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	495.961.895.517

74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	894.443.363
75	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	651.709.500
76	Program Kepegawaian Daerah	1.412.614.313
77	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.872.745.800
78	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	306.629.300
79	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	784.827.703
80	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1.177.582.257
81	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	198.696.579
82	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	304.553.065
83	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	514.657.000
84	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.630.321.500
85	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	162.685.500
86	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.939.856.400
87	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	44.926.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>1.592.005.031.775</b>

Perubahan anggaran diatas ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan Tahun 2023 terhadap seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ke-2 (dua) pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan periode 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 95% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
<b>Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan</b>					
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik</b>					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	89,8	97,6%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP*	100%
		Nilai SAKIP	52	50,17*	96,4%
<b>Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas</b>					
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan</b>					

2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	75%	94,29%	125%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	15%	11%	73%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	45%	39,78%	88%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	60%	58,54%	97%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,150	0,1143	76%
<b>Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif</b>					
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing</b>					
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	57,01	57	100%
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	72	66,63	92%
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62,32	61,86	99,26%
<b>Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif</b>					
<b>Tujuan 4 : Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif</b>					
6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,2	3,65	114%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	3,4	2,72	80%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	7,2	5,47	75%
<b>Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat</b>					
<b>Tujuan : Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan</b>					
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan	100%	99,62%	99,62%

	Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan			
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	190	190,52	99,7%
	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%
	Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%

**Keterangan :**

Tanda (\*) : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

## B. ANALISIS TERHADAP REALISASI KINERJA

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan didukung oleh 7 (tujuh) sasaran strategis serta 18 (delapan belas) indikator kinerja. Berikut adalah uraian dan penjelasan-penjelasan lebih detail terkait realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2023.

### **MISI 1 : MENCIPTAKAN KULTUR SERTA KARAKTER YANG BERSIH, JUJUR, TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN**

Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan” terdiri dari 3 (tiga) indikator yang menjawab Misi 1 (Satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan “*Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi Pada Pelayanan*” dan Tujuan RPJMD “*Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik*” diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

Tabel : Realisasi Kinerja Pada Misi 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	89,8	97,6%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP*	100%
		Nilai SAKIP	52	50,17*	96,4%

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai Misi 1 (satu) yakni : “Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi Pada Pelayanan”. Penekanan pada kalimat “Berorientasi Pada Pelayanan” dapat diwujudkan melalui pelayanan yang berkualitas dengan mengutamakan kepentingan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dapat tercermin atau diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Representasi penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui unit pelayanan publik di sektor perizinan, kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pencatatan sipil, dan sosial. Indeks Kepuasan Masyarakat atau disingkat IKM diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat wajib dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan antara lain :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian



- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

**Tabel : Perbandingan antara realisasi kinerja (IKM) dengan target kinerja tahun 2023**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
<b>1</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	89,8	97,6%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 mencapai nilai sebesar 89,9 dari target yang ditetapkan sebesar 92. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat merasa puas terhadap kinerja pelayanan tersebut. Perolehan nilai tersebut merupakan rata-rata dari masing-masing IKM dari unit pelayanan publik yang telah melaksanakan survey internal secara mandiri. Secara umum, kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 tergolong “memuaskan” dengan predikat “B”. Adapun rincian perolehan nilai IKM dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel : Nilai IKM per Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023**

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Rata-Rata Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	DPMPTSP	Januari-Oktober	3.802	3.714	3.687	3.995	3.728	3.691	3.760	3.710	3.4	93.639	A (Sangat Baik)	217	Manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu penyelesaian</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker pelayanan ditambah dan ditingkatkan lebih baik lagi</li> <li>- Pelayanan yang baik dan Sopan</li> <li>- Pelayanan di tingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah</li> </ul>	
2	Dinas Sosial	Januari-Oktober	3.45	3.45	3.43	3.93	3.48	3.40	3.58	3.48	3.95	88.34	A (Sangat Baik)	40	Manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Produk Spesifikasi jenis pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat waktu Pelayanan yang kepada Masyarakat</li> <li>- Memberikan Pelatihan Khusus terkait <i>service excellent</i> kepada petugas layanan</li> </ul>	
3	Dukcapil	Januari-Oktober	3.903	4	3.664	4	3.638	3	3.503	3.387	4	89.67	A (Sangat Baik)	155	Manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kompetensi Pelaksana</li> <li>- Perilaku Pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker pelayanan ditambah dan ditingkatkan lebih baik lagi</li> <li>- Mempercepat waktu Pelayanan yang kepada Masyarakat</li> </ul>	
4	Dinas Kesehatan	Januari-Oktober	3.227	3.070	3.781	3.868	3.551	2.570	3.086	2.722	3.659	81.22	B (Baik)	370	Manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi Pelaksana</li> <li>- Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kompetensi Pelaksana</li> <li>- Meningkatkan layanan penanganan pengaduan</li> </ul>	

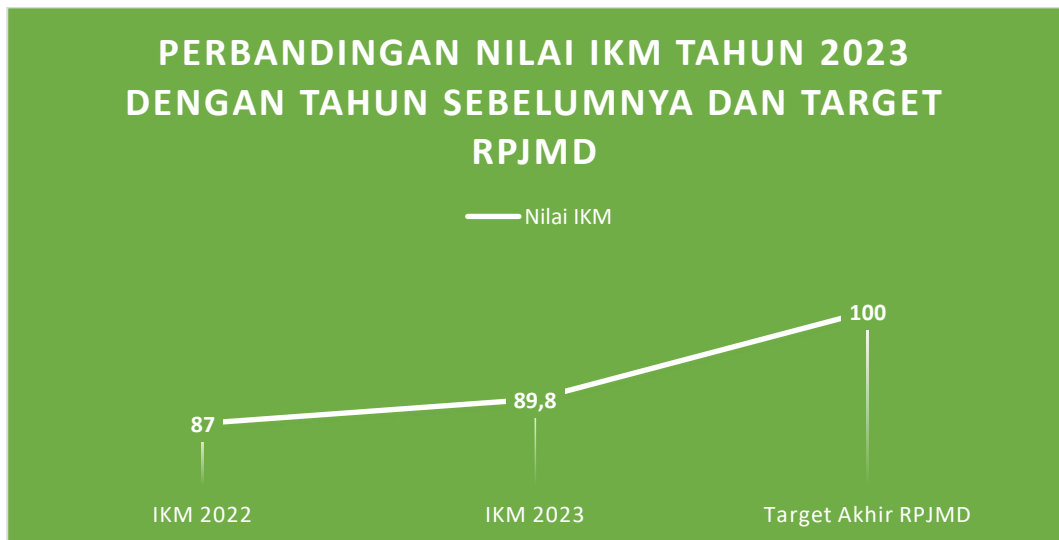
5	Dinas Pendidikan	Januari-Oktober	3.76	3.73	3.72	4	4	3.75	3.73	4	3.78	94.87	A (Sangat Baik)	169	Manual	- Sistem Mekanisme prosedur - Waktu Penyelesaian	- Locket Pelayanan ditambah dan di percepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet - Mempercepat waktu Pelayanan yang kepada Masyarakat
6	Puskesmas Bawomataluo	Januari-Oktober	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	95.93	A (Sangat Baik)	350	Manual	- Kompetensi Pelaksana Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Meningkatkan layanan penanganan pengaduan
7.	Puskemas Hilisataro	Januari-Oktober	3.42	3.36	3.38	3.47	3.41	3.33	3.48	3.43	3.36	85.00	B (Baik)	184	Manual	- Kompetensi Pelaksana Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Meningkatkan layanan penanganan pengaduan
Nilai Rata-Rata IKM Kabupaten Nias Selatan												89.80	B (Baik)	-	-		

Tabel : Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM

No	Nama UPP	Link Laporan Pelaksanaan SKM*
1.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-DPMP2TSP">https://tinyurl.com/LaporanSKM-DPMP2TSP</a>
2.	Dinas Sosial	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-DINSOS">https://tinyurl.com/LaporanSKM-DINSOS</a>
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-DISDUKCAPIL">https://tinyurl.com/LaporanSKM-DISDUKCAPIL</a>
4.	Dinas Kesehatan	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-DINKES">https://tinyurl.com/LaporanSKM-DINKES</a>
5.	Dinas Pendidikan	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-DISDIK">https://tinyurl.com/LaporanSKM-DISDIK</a>
6.	UPTD Puskesmas Bawomataluo	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-UPTD-Pus-Bmataluo">https://tinyurl.com/LaporanSKM-UPTD-Pus-Bmataluo</a>
7.	UPTD Puskesmas Hilisataro	<a href="https://tinyurl.com/LaporanSKM-UPTD-Pus-Hilisataro">https://tinyurl.com/LaporanSKM-UPTD-Pus-Hilisataro</a>

**Tabel: Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat**

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD (2023)
89,8	87	88,31 – 100

**Grafik: Perbandingan IKM Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD**

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2023 sebesar sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai IKM pada tahun 2022. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga masih belum memenuhi 100% target akhir RPJMD. Namun secara umum, capaian Nilai IKM tahun 2023 ini tergolong “memuaskan”.

Analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”, diantaranya :

- a. Unit Pelayanan Publik atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah mampu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri setiap tahunnya dan bila perlu berbasis elektronik dengan memanfaatkan aplikasi secara online.
- b. Mendorong Unit Pelayanan Publik atau Perangkat Daerah untuk menggunakan hasil survei kepuasan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik dengan menindaklanjuti rekomendasi atau perbaikan dari hasil survei IKM.

- c. Mendorong UPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mampu menyelenggarakan pelayanan berbasis digital/online.

## 2. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah pernyataan profesional pemeriksa/auditor terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai sehingga laporan keuangan yang disusun bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Penyajian laporan keuangan didasarkan oleh beberapa kriteria berikut:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh Pemeriksa BPK terhadap laporan keuangan adalah :

- 1) **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- 2) **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Pragraf Penjelasan (WTP-DPP)** adalah opini yang dikeluarkan oleh Auditor dalam keadaan tertentu harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- 3) **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini auditor terhadap laporan keuangan yang diterbitkan jika sebagian besar informasi

dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;

- 4) **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- 5) **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** adalah opini audit yang diterbitkan atau oleh sebagian akuntan dianggap bukan opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat. Artinya tidak ada opini yang diberikan atau opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Berdasarkan target yang direncanakan dalam dokumen RPJMD, predikat Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Realisasi yang ditampilkan dalam laporan kinerja ini masih berupa realisasi tahun sebelumnya yakni Opini terhadap Tahun Anggaran 2021, mengingat pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2023 masih dilaksanakan oleh BPK-RI hingga dokumen laporan kinerja ini disusun. Adapun Opini pada tahun Anggaran 2021 yakni WDP.

**Tabel : Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja “Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah” Kabupaten Nias Selatan**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP*	100%

\* keterangan :

Realisasi tahun 2023 masih menunggu hasil audit BPK-RI

Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan didasari oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan menguji bukti-bukti pendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari Neraca Tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1376/S/XVIII.MDN/05/2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

#### Perbandingan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemkab Nias Selatan dari Tahun ke Tahun



Dalam hal Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

1. Kekurangan Volume dan Mutu Pekerjaan atas 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp878.573.323,95;

2. Penggunaan dana BOS pada SD Negeri 075105 Hilizamurogo tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 147.697.600,00;
3. Pengelolaan aset tetap belum memadai, antara lain sebanyak 6 bidang tanah belum dicatat di KIB A berpotensi dikuasai pihak lain, aset tetap bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 tidak mencerminkan nilai sebenarnya, aset tetap sebanyak 53 unit peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 1.075.584.283,77 dan sebanyak 267 unit rusak berat sebesar Rp16.114.288.746,06.

Berdasarkan hasil temuan BPK diatas, telah ditindaklanjuti rekomendasi BPK dalam hal penguatan sistem pengendalian intern antara lain :

1. Memproses temuan kelebihan bayar dan dikembalikan pada kas daerah;
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dana BOS;
3. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan;
4. Meningkatkan penatausahaan aset milik daerah sehingga temuan-temuan yang dikemukakan dapat diinventarisasi dengan baik sehingga pengelolaan aset daerah semakin lebih baik.

### **3. Nilai SAKIP**

Adapun target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026 yaitu 52 atau dengan predikat CC. Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2022 yaitu 50,17 dengan predikat CC. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



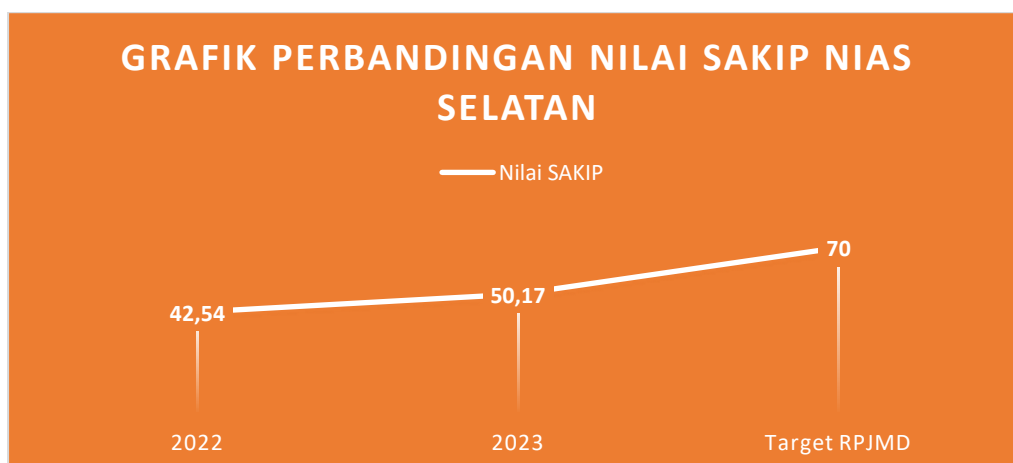
**Tabel : Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Target yang telah ditetapkan**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	52	50,17*	96,4%

Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi atau laporan hasil evaluasi (LHE) Kementerian PANRB berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/164/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dinilai dengan predikat “cukup” dalam implementasinya, artinya bahwa sistem dan tatanan dalam AKIP Nias Selatan masih belum dapat diandalkan, belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

**Tabel : Perbandingan Nilai SAKIP dengan tahun sebelumnya dan target RPJMD**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD (2026)
52	50,17*	42,54	70



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, Nilai SAKIP Nias Selatan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih belum menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB secara maksimal terkait laporan kinerja tahun sebelumnya dimana masih banyak kekurangan/kelemahan yang perlu diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Nomor : B/854/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Adapun catatan yang menjadi kelemahan/kekurangan yang perlu diperbaiki antara lain :

**a. Perencanaan**

1. Cascading/penjenjangan kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor dalam proses penyusunannya. Hal tersebut mengakibatkan penetapan kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil/ outcome sesuai dengan level jabatannya. Contohnya terlihat pada PK Tahun 2023 dimana terdapat kinerja yang sama persis antara Bupati Nias Selatan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu indikator "Persentase rumah tangga pengguna air bersih" dan "Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik";
2. Terdapat kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya dapat menjawab seluruh isu strategis, tugas pokok, dan fungsi perangkat daerahnya. Contohnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dimana PK Kepala Dinas Tahun 2023 baru mengakomodir kinerja terkait administrasi dan sasaran kinerja yang hanya diukur dengan pelaksanaan kegiatan, yaitu sasaran "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Disperindag" dengan indikator "Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu" dan sasaran "Terwujudnya stabilitas harga barang di daerah" yang hanya diukur dengan indikator "Persentase monitoring dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok". Contoh lainnya dengan kondisi serupa seperti

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

3. Terdapat PD yang belum menyampaikan dokumen PK Tahun 2023 melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Contohnya pada Dinas Pendidikan;
4. Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda masih ditemukan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja;
5. Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing, namun kinerja individu tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi.

**b. Pengukuran Kinerja**

1. Aplikasi manajemen kinerja belum digunakan secara optimal untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Hal tersebut terlihat dari PD mengisi data capaian kinerja belum secara patuh dalam aplikasi sehingga datanya belum ter-update dengan baik;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja outcome sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
3. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
4. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

**c. Pelaporan Kinerja**

1. Laporan kinerja PD belum dipublikasikan secara umum melalui website;
2. Penyajian laporan kinerja pada PD belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam

untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian, data pembandingan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi sumber daya, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya;

3. Laporan kinerja belum menyajikan benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional;
4. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang tidak lebih baik dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Bupati Nias Selatan Tahun 2023, yaitu indikator "Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah" yang masih ditargetkan pada predikat "WDP";
5. Terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya berada dibawah 75 persen. Contohnya pada tingkat Pemerintah Daerah, yaitu indikator "Persentase rumah tangga pengguna air bersih" dengan tingkat capaian kinerja 23,18% dan indikator "Indeks Pendidikan" dengan capaian kinerja hanya sebesar 16,74 persen

#### **d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021;
2. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD;
3. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang mendalam dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP;

4. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD;
5. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Berdasarkan catatan-catatan perbaikan diatas, Kementerian PANRB memberikan rekomendasi - rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti/diperbaiki sehingga implementasi SAKIP Nias Selatan semakin meningkat. Adapun matriks tindaklanjut rekomendasi Kementerian PANRB dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : Matriks Tindaklanjut Rekomendasi SAKIP Nias Selatan Tahun 2023**

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah;	Dilaksanakan asistensi terhadap 12 Perangkat Daerah Prioritas untuk melakukan perbaikan dokumen cascading kinerja	12 PD	Januari – Maret 2024	Tim Sakip Nias Selatan & 12 PD Prioritas	Masih dalam proses perbaikan dokumen cascading kinerja
2	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD sehingga tujuan dan sasaran strategis lebih berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawall kinerja;	Dilaksanakan asistensi kepada 12 PD yang menjadi prioritas untuk perbaikan dokumen perencanaan	12 PD	Januari – Maret 2024	Tim Sakip Nias Selatan & 12 PD Prioritas	Masih dalam proses perbaikan dokumen perencanaan kinerja PD

3	Menyampaikan PK tahun berjalan secara lengkap dari level tertinggi sampai terkecil melalui esr.menpan.go.id agar dapat dipastikan penjabaran kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;	Mendorong semua PD untuk menyusun dan menyampaikan PK dari level tertinggi sampai terkecil esr.menpan.go.id	63 PD	Januari – Maret 2024	Tim Sakip Nias Selatan & Seluruh PD dan Kecamatan	Masih dalam proses penyusunan dan penyampaian di aplikasi esr
4	Memfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya sebagai dasar penetapan kinerja setiap level jabatan	Melakukan screening pada program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis dan memanfaatkannya dalam penetapan kinerja setiap level jabatan	63 PD	Januari – Maret 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Masih dalam proses penyelesaian
5	Melakukan reuiu kinerja individu dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja setiap individu dapat menunjang kinerja organisasi	Mendorong setiap PD untuk melakukan reuiu kinerja individu dan menyusun matriks pembagian kinerja dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja BKN dan menetapkan sasaran kinerja pegawai berdasarkan matriks	63 PD	Januari – Maret 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Masih dalam proses penyelesaian
6	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari level pimpinan sampai ke individu secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulanan);	Meningkatkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja dalam memonitoring dan evaluasi kinerja	63 PD	Januari – Maret 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Masih dalam proses penyelesaian
7	Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan,	Meningkatkan kualitas monev pencapaian kinerja agar berimbang antara capaian kinerja dan capaian anggaran	63 PD	Januari – Desember 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Dalam proses pelaksanaan

	pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik					
8	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Menyampaikan kepada Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam mutasi dan rotasi pegawai	63 PD	Januari – Desember 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Telah disampaikan melalui rapat lintas PD
9	Menginformasikan laporan kinerja baik dari level pemerintah daerah maupun PD dalam website sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik	Mendorong PD untuk menyampaikan laporan kinerja di website baik website pemda dan perangkat daerah	63 PD	Januari – Maret 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Dalam proses pelaksanaan
10	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional	Melakukan asistensi kepada PD untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja	63 PD	Januari – Maret 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Dalam proses pelaksanaan
11	Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang	Menyampaikan kepada pimpinan daerah dan unit kerja agar memanfaatkan informasi laporan kinerja dalam setiap pengambilan kebijakan terkait kinerja	63 PD	Januari – Maret 2024	Seluruh PD dan Kecamatan	Telah disampaikan melalui rapat lintas PD



12	Mengimplementasikan pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021	Telah menyusun perkara tentang evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan evaluasi	63 PD	Januari – Maret 2024	Inspektorat	Dalam proses pelaksanaan
13	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP masing-masing PD, sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Mendorong para evaluator untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja baik melalui bimtek atau studi banding di daerah yang sudah lebih baik evaluasi internal nya	12 Orang	Januari – Desember 2024	Inspektorat	Dalam proses pelaksanaan
14	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD	mendorong evaluator untuk meningkatkan laporan hasil evaluasi sesuai permenpan 88/2021	63 PD	Januari – maret 2024	Inspektorat	Telah disampaikan dalam rapat tim asistensi saki
15	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	Mendorong tim evaluator agar memonitoring tindaklanjut rekomendasi evaluasi internal dan melaporkannya kepada pimpinan daerah	63 PD	Januari – Mei 2024	Inspektorat	Telah disampaikan dalam rapat tim asistensi saki
16	Menyusun kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP PD	Menyusun draft perkara terkait reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal	1 dok	Januari – Mei 2024	Inspektorat	Masih dalam proses penyusunan

17	Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola, serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (cascading) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah	Menyampaikan kepada pimpinan daerah dan pimpinan unit kerja terkait peningkatan pemahaman tentang SAKIP dan implementasinya	63 PD	Januari – maret 2024	Tim Sakip Nias Selatan	Telah disampaikan dalam rapat tim asistensi sakip
----	--	---	-------	----------------------	------------------------	---

Dari tabel matriks tindaklanjut diatas, sebagian besar sedang dalam proses perbaikan atau penyempurnaan oleh Tim Asistensi SAKIP Nias Selatan dan 12 Perangkat Daerah Prioritas antara lain:

- a. Tim Asistensi SAKIP yang terdiri dari : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Bappeda Nias Selatan, Inspektorat Nias Selatan telah melakukan asistensi (mendampingi dan memfasilitasi) Perangkat Daerah dalam melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah hingga Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan perbaikan dokumen SAKIP dan menindaklanjuti hasil rekomendasi Kementerian PANRB.
- c. Melakukan asistensi intensif terhadap 12 perangkat daerah prioritas untuk perbaikan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Adapun ke-12 Perangkat Daerah tersebut antara lain :
  1. Sekretariat Daerah
  2. Bappeda
  3. Inspektorat
  4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
  5. Dinas Pertanian
  6. Dinas Sosial
  7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
  8. Dinas Kelautan dan Perikanan
  9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  11. Dinas Komunikasi dan Informatika
  12. Dinas Perhubungan

## MISI 2 : PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKALA PRIORITAS

Misi 2 Kepala Daerah “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas” yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Penjelasan terhadap realisasi/capaian ke-lima indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**TABEL : REALISASI KINERJA MISI 2 TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas					
Tujuan 2 : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan					
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	75%	94,29%	125%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	15%	11%	73%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	45%	39,78%	88%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	60%	58,54%	97%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,150	0,1143	76%

## 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Berikut adalah realisasi kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2023 :

**Tabel : realisasi kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	75%	94,29%	177%

Tingkat kondisi dimaksud adalah kondisi jalan minimal pada kondisi sedang, tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten (Kondisi baik dan sedang) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan}} \times 100\%$$

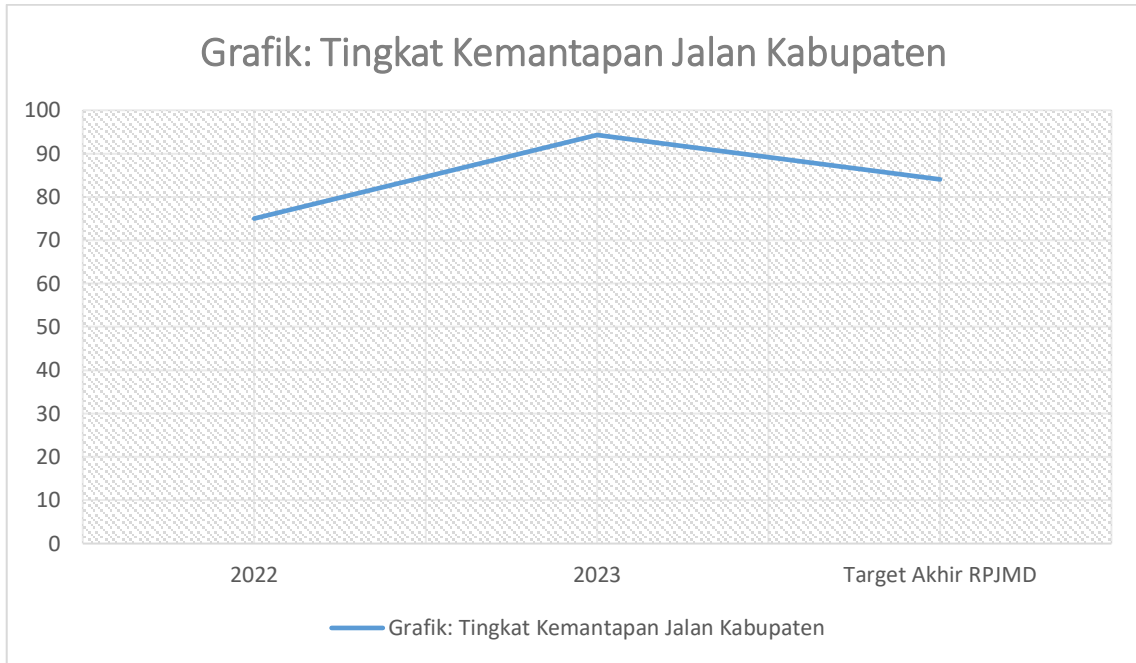
Pada tahun 2023, ditargetkan persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 75% dan terealisasi sebesar 94,29%. Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang 763.026 Km, sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten Nias Selatan adalah 809.231 Km dengan persentase 94,29%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten

$$\frac{763.026 \text{ Km}}{809.231 \text{ Km}} \times 100\% = 94,29\%$$

**Tabel : Perbandingan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD (2026)
75%	94,29%	71,24%	84,09%



**Tabel : Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023**

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilimondrege Raya	Hilimondrege Raya	Onolalu	5.300	M
2	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilifanikha		Hilisalawa'ahe	8.100	M
3	Pembangunan jalan Desa Strategis Jalan Lahusa Idanotae	Lahusa Idanotae	Idanotae	275	M

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Nias Selatan Tahun 2023

**Gambar : Dokumentasi Perbaikan Jalan Kabupaten Tahun 2024**



Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Nias Selatan Tahun 2023

**Tabel : Daftar Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2024**

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan drainase di ruas Jalan Naniyo	Sondregeasi	Luahagundre	1064	M
2	Pembangunan tembok penahan tanah dan perkerasan badan jalan di Naniyo Kab. Nias Selatan	Sondregeasi	Luahagundre	311,89	M
3	Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju Gedung Kesenian di Pantai Sorake	Botohili Sorake	Luahagundre	73,5	M

4	Lanjutan pembangunan jalan non Status dari Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo menuju Lewa- Lewa Kecamatan Boronadu	Sambulu	Ulunoyo	534	M
5	Lanjutan Pembangunan Jalan non status di Balikhi Desa Hiliganowo	Hiliganowo	Teluk Dalam	46	M
6	Lanjutan Pembangunan Jalan non status menuju RSUD di Desa Hilianaa	Hiliana'a	Teluk Dalam	124	M
7	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi dari Dusun 4 menuju Dusun 5 Alo'oa Desa Hiliaurifa Kecamatan Maniamolo	Hiliaurifa	Maniamolo	110	M
8	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi di Dusun I (satu) Desa Hilimboe Kecamatan Susua	Hilimboe	Susua	56	M
9	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi ruas Jl. Sifitu Ewali (dari Desa Sebuasi menuju Desa Sidua Ewali) Kecamatan Pulau Pulau Batu	Sebuasi	PP. Batu	128	M
10	Lanjutan pembangunan Jl. Naniyo Kecamatan Luahagundre	Sondregeasi	Luahagundre	1064	M
11	Lanjutan pengerasan jalan non status Hao sauso Desa Lawindra Kecamatan Umbunasi	Lawindra	Umbunasi	232	M



12	Lanjutan Peningkatan jalan non status dari Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama menuju Desa Hilimondregeraya Kecamatan Onolalu	Siwalawa	Fanayama	80	M
13	Lanjutan semenisasi jalan non status dari Desa Hilisao'oto menuju Desa Orahuhili Kecamatan Mazo	Hilisao'oto	Mazo	74,41	M
14	Lanjutan semenisasi jalan non status dari Desa Hoya menuju Desa Luahandroito Kec. Mazo	Hoya	Mazo	128,5	M
15	Lanjutan semenisasi jalan non status dari jl. Bawomataluo menuju Namo Sifelendrua Kecamatan Fanayama	Bawomataluo o	Fanayama	500	M
16	Lanjutan semenisasi jalan non status dari simpang Lazawatewu Desa Hilidanayao menuju Desa Hilimboho Kecamatan Susua	Hilidanayao	Susua	58,94	M
17	Lanjutan semenisasi jalan non status di Desa Gabungan Tasua Kecamatan Somambawa	Gabungan Tasua	Somambawa	141,22	M
18	Lanjutan semenisasi Jl. Hilizalootano dari Idanowawa menuju Kantor Camat Kecamatan Mazino	Hilizalo'otan o	Mazino	378,5	M
19	Pembangunan Jalan non status di Desa Borowosi menuju Kecamatan Ulunoyo	Borowosi	Ulunoyo	181	M
20	Pembangunan Jalan dari jalan Nasional	Hilisataro	Toma	217,98	M

	menuju Puskesmas Hilisataro Kecamatan Toma				
21	Pembangunan jalan dari Pintu Gerbang Botohili Salo'o menuju Jalan Fahasaradodo Desa Botohili Salo'o Kec. Luahagundre	Botohili Salo'o	Luahagundre	122,5	M
22	Pembangunan jalan dari ruas jalan Lolomatua jembatan Ulunoyo menuju ruas jalan Sambulu Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo	Orahili	Ulunoyo	85	M
23	Pembangunan jalan di Walo Green menuju BBI Kecamatan Teluk Dalam	Nanowa	Teluk Dalam	150	M
24	Pembangunan jalan menuju Hiliafuriata Kel. Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	72	M
25	Pembangunan Jalan non status dari Jalan Nasional menuju Fazui Laza Kecamatan Fanayama	Bawomatalu o	Fanayama	63,5	M
26	Pembangunan jalan non status (dari Tetehosi Desa Tanonikoo menuju Dao-Dao Januwo) Kecamatan Ulu Idanotae	Tanoniko'o	Idanotae	490,8	M
27	Pembangunan jalan non status di Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa	Hiliwatema	Lahusa	126,7	M
28	Pembangunan Jalan non Status di Jalan Fanayama Baloho Kecamatan Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	46,5	M
29	Pembangunan Jalan Non Status di	Hiliana'a	Teluk Dalam	384,8	M

	Kompleks Perumahan Yofe				
30	Pembangunan jalan non status di Lawayo Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam	Bawoza'ua	Teluk Dalam	204	M
31	Pembangunan Jalan non status (menuju Gereja Kristen Kemah Daud Tamariskha) Kecamatan Telukdalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	40	M
32	Pembangunan jalan semenisasi dari jalan Pramuka menuju Gereja GKB Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	65,66	M
33	Pembukaan badan jalan Bukit Balikhi di Desa Hiliganowo	Hiliganowo	Teluk Dalam		M
34	Peningkatan jalan Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam	Bawodobara	Teluk Dalam	720	M
35	Peningkatan jalan Bawomaenamolo-Sotoo Kecamatan Luahagundre	Bawomaenamolo	Luahagundre	223	M
36	Peningkatan jalan non status di Walo Kecamatan Telukdalam	Nanowa	Teluk Dalam	376	M
37	Peningkatan Jl. Hilisataro dari Hilisataro Gewa menuju SMA Negeri 1 Toma	Hilisataro	Toma	675,51	M
38	Peningkatan Jl. Maluo dari Desa Hiliadulo menuju Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliadulo	Hilisalawa'ahe	288	M
39	Peningkatan ruas jalan Aramo di Kecamatan Aramo	Aramo	Aramo	1500	M
40	Rehabilitasi Jl. Togizita Kec.	Togizita	Hilimegai	110	M

	Hilimegai				
41	Rehabilitasi Jl. Bawolowalani dari Jalan Nasional (samping Gereja BNKP Yohanes) menuju Banua Satua Bawolowalani	Bawolowalani	Teluk Dalam	200	M
42	Rehabilitasi Jl. Bawomataluo Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	133	M
43	Rehabilitasi Jl. Boronadu	Boronadu	Boronadu	1249	M
44	Rehabilitasi Jl. Lawelu (dari pekan Orahili menuju pekan Hiliweto) Kec. Onohazumba	Orahili	Onohazumba	1082	M
45	Rehabilitasi jl. Lolomatua (di Desa Lawa-lawa Luo Dusun Silewe) Kec. Lolomatua	Lawa-lawa Luo	Lolomatua	50	M
46	Rehabilitasi Jl. Soi (dari Arah Kantor Camat Ulususua menuju Pasar Pekan Godu)	Godu	Ulususua	763	M
47	Rehabilitasi Jl. Soi dari Desa Hilimboe Kecamatan Susua menuju Kecamatan Ulu Susua	Hilimboe	Ulususua	272	M
48	Rehabilitasi Jl. TPA Hilitobara di Desa Hilitobara Kecamatan Telukdalam	Hilitobara	Teluk Dalam	279	M
49	Semenisasi Jalan di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama	Hilinawalo Fau	Fanayama	134	M
50	Semenisasi jalan non status dari Desa Ulumazo menuju Desa Hilimaufa Kecamatan Mazo	Hilimaufa	Mazo	146	M
51	Semenisasi Jalan non status dari	Tuhemberua	Lolomatua	110	M

	Dusun 4 menuju Dusun 5 Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua				
52	Semenisasi Jalan non status dari jalan Nasional menuju Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo	Hilisimaetan o	Maniamolo	175	M
53	Semenisasi Jalan non status dari Pasar menuju Desa Silina Kecamatan Simuk	Silina	Simuk	365,58	M
54	Semenisasi Jalan non status dari Puskesmas Susua Lama menuju puskesmas Susua Baru Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua	Sifalago Susua	Susua	109,24	M
55	Semenisasi Jalan non status Desa Zia Biang Dusun I Banua Hilizamogoboro Kecamatan Pulau Pulau Batu Utara	Zia Biang	PP. Batu Utara	201,85	M
56	Semenisasi jalan non status di Baloho di belakang BPN	Teluk Dalam	Teluk Dalam	130,37	M
57	Semenisasi jalan non status di Desa Bawogosali	Bawogosali	Maniamolo	159	M
58	Semenisasi Jalan non status di Desa Bawolahusa Doli- Doli Kecamatan Mazino	Bawolahusa Doli-Doli	Mazino	80	M
59	Semenisasi jalan non status di Desa Orahili Faomasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Orahili Faomasi	Maniamolo	173	M
60	Semenisasi jalan non status menuju	Ambukha	Somambawa	38,57	M

	SD Hoya Ambukha Kecamatan Somambawa				
61	Semenisasi jalan non status/TPT menuju pantai Mogae Kec. Lahusa	Mogae	Lahusa	156,3	M
62	Semenisasi Jl. Eho Tebolo dari Desa Bawootanio Omega menuju Desa Lumbui Kecamatan Hibala	Bawootanio Omega	Hibala	290	M
63	Swakelola pematangan lahan di Lokasi Kantor Pemerintahan di Lawayo Desa Bawozaua Kec. Teluk Dalam	Bawozaua	Teluk Dalam		M
64	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Desa Ehosakhozi Kec. Huruna	Ehosakhozi	Huruna	93	M
65	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi dari jalan pramuka menuju Gereja GKB Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	65,66	M
66	Lanjutan peningkatan Jalan Maluo dari Desa Hiliadulo menuju Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliadulo	Hilisalawa'ahe	178	M
67	Lanjutan rehabilitasi jalan Yofe	Hiliana'a	Teluk Dalam	91	M
68	Lanjutan semenisasi jalan non status di Desa Bawogosali Kec. Maniamolo	Bawogosali	Maniamolo	62	M
69	Lanjutan semenisasi jalan non status di Jalan Fanayama Kec. Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	124	M
70	Pembangunan jalan dari Daerah Gumbu menuju Pantai	Hilitobara	Teluk Dalam	82	M

	Ikuhele Desa Hilitobara Kec. Teluk Dalam				
71	Pembangunan jalan dari Jalan Baloho Indah menuju Lapangan Futsal Atila	Teluk Dalam	Teluk Dalam	116,7	M
72	Pembangunan jalan dari Jl. Ehosofayo menuju Daro-Daro Nina Kec. Toma	Ehosofayo	Toma	108	M
73	Pembangunan Jalan di Komplek Lanal Nias	Teluk Dalam	Teluk Dalam	125,8	M
74	Pembangunan jalan non status untuk perluasan kawasan permukiman penduduk di Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	64,5	M
75	Pembangunan jalan Pedestrian menuju Pantai Nanio	Sondregeasi	Luahagundre		M
76	Pembangunan pengerasan jalan di Dusun Satu Desa Tanonikoo Kec. Gomo	Tanoniko'o	Gomo	158	M
77	Pembangunan semenisasi jalan dari Desa Ewo Kec. Lolomatua menuju Desa Suka Maju Dusun 3 Fadorohili Kec. O'ou	Ewo	Lolomatua	137,5	M
78	Pembangunan Semenisasi jalan dari Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur menuju Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur	Labuhan Hiu	PP. Batu Timur	185	M
79	Pembangunan jalan semenisasi non status dari jalan raya arah lagundri Km 7 menuju Gereja	Bawofanayama	Fanayama	102,7	M

	Bethel Indonesia Jemaat Sukacita Bombono Desa Bawofanayama Kec. Fanayama				
80	Pembangunan TPT di SMPN 2 Mazo di Desa Luahandroito Kec. Mazo	Luahandroito	Mazo	46	M
81	Pembangunan jalan non status (dari jalan Golkar Ujung Kecamatan Telukdalam menuju Hilionaha Kec. Onolalu)	Teluk Dalam	Teluk Dalam	120,3	M
82	Pengerasan jalan Hiliwaebu Dusun 2 menuju Desa Hilitobara dan Desa Hilimboho Kec. Susua	Hilitobara	Susua	46	M
83	Peningkatan jalan dari Desa Hilimbaruzo menuju Desa Siraha Kec. Boronadu	Hilimbaruzo	Boronadu	65	M
84	Rehabilitasi jalan dari Desa Tanoniko'o menuju Desa Damai	Tanoniko'o	Amandraya	117	M
85	Rehabilitasi jalan Dusun III Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetan o	Maniamolo	245	M
86	Rehabilitasi jalan non status dari Jl. Pelita menuju Jl. Pramuka	Teluk Dalam	Teluk Dalam	107	M
87	Rehabilitasi jl. Soi mulai dari simpang Desa Foikhu Fondrako menuju Kecamatan Ulususua	Foikhu Fondrako	Ulususua	268	M
88	Semenisasi jalan Dao-Dao Zanuwo Kec. Susua	Dao-Dao Zanuwo	Susua	48	M
89	Semenisasi jalan dari Desa Marao	Marao	Ulunoyo	166	M



	Kecamatan Ulunoyo menuju Desa Tumari Kecamatan Lolomatua				
90	Semenisasi jalan dari Desa Sifalago Susua menuju Desa Orahili Susua	Sifalago Susua	Susua	91	M
91	Semenisasi jalan dari Jalan Nasional menuju Daro-Daro Sisiwa Desa Bawoganowo Kec. Toma	Bawoganowo	Toma	98,5	M
92	Semenisasi jalan dari Jalan Pendidikan menuju SMK Negeri 1 Amandraya Desa Tuindrao Kec. Amandraya	Tuindrao	Amandraya	117	M
93	Semenisasi jalan dari Perbatasan Desa Hilimaera dengan Desa Hilifakhe menuju Desa Bawololomatua Kec. Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	64	M
94	Semenisasi jalan Desa Hilidanayao menuju SMP Negeri 6 Susua Kec. Susua	Hilidanayao	Susua	27,3	M
95	Semenisasi jalan di Desa Hiliorahua Zoi Kec. Susua	Hiliorahua Zoi	Susua	94	M
96	Semenisasi jalan di Desa Lolosoni Kec. Gomo	Lolosoni	Gomo	61	M
97	Semenisasi jalan non status daru Jalan Sudirman menuju Mushola Al Bayyinah dan Rumah Yatim Duafa Yaa Bunayya Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	184,5	M
98	Semenisasi jalan	Hilimaera	Ulunoyo	119,5	M

	non status Desa Hilimaera Kec. Ulunoyo				
99	Semenisasi jalan non status di Desa Hilimaenamolo Kec. Luahagundre	Hilimaenamolo	Luahagundre	71,5	M
100	Semenisasi jalan non status di kawasan permukiman Lalagatua Desa Hilianaa Kec. Teluk Dalam	Hilianaa	Teluk Dalam	70,4	M
101	Semenisasi jalan non status di Komplek Jalan menuju Dinas Kesehatan	Teluk Dalam	Teluk Dalam	33	M
102	Semenisasi jalan non status di Olayama menuju Situs Omo Kara Kec. Huruna	Olayama	Huruna	111	M
103	Semenisasi jalan non status di Sifaoroasi menuju SMP 3 Huruna Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	75	M
104	Semenisasi jalan non status dusun 1 RT 3 Desa Sifaoroasi Huruna Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	56,5	M
105	Semenisasi jalan non status lintas komunitas susteran menuju Sekolah TK Santo Antonius Amandraya	Amandraya	Amandraya	48	M
106	Semenisasi jalan non status Malimbe atas dari Gereja BNKP Jemaat Sion Nanowa lingkungan 3 Desa Nanowa Kec. Telukdalam menuju simpang Jalan ke Lapas	Nanowa	Teluk Dalam	60,01	M
107	Semenisasi jalan	Bawo'otalua	Lahusa	51,5	M

	non status menuju Jalan Baru Simpang SD Bawootalua Kec. Lahusa				
108	Semenisasi Lorong Sumomaru Lorong Boli Desa Fuge Kec. Pulau-Pulau Batu Barat	Fuge	PP. Batu Barat	175	M
109	Swakelola pembukaan badan jalan di Wilayah Kec. Lolomatua, Kec. Ulunoyo dan Kec. Ulususua melalui Karya Bakti TNI		Lolomatua	4700	M
110	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilimondrege Raya	Hilimondrege Raya	Onolalu	5300	M
111	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilifanikha		Hilisalawa'ahe	8000	M

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Nias Selatan Tahun 2023

## 2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah</b>	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	15%	11%	73%

Sarana air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Demikian halnya di wilayah Kabupaten Nias Selatan, kebutuhan masyarakat akan air bersih masih sangat tinggi. Permasalahan yang

dihadapi adalah belum memadainya sarana prasarana yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Sarana air bersih yang dibutuhkan berupa air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang telah memenuhi syarat kesehatan. Jumlah rumah tangga (RT) yang membutuhkan atau menggunakan air bersih yakni sebanyak 63.980 rt, sedangkan sarana air bersih yang dibangun atau telah tersedia yakni hanya untuk memenuhi kebutuhan 7.114 rumah tangga. Adapun perhitungan terhadap persentase rumah tangga pengguna air bersih sebagai berikut :

*Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yg dapat terlayani*

*Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga  
pengguna air bersih*

*X 100%*

Diperoleh perhitungan persentase rumah tangga pengguna air bersih sebagai berikut :

$$\frac{7.114 \text{ RT}}{63.980 \text{ RT}} \times 100\% = 11,12\%$$

Target yang direncanakan pada indikator “persentase rumah tangga pengguna air bersih” pada tahun 2023 sebesar 15% hanya dapat terealisasi sebesar 11,12 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 73%. Hal ini tentu saja masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar 15% pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

**Gambar : Pembangunan SPAM Tahun 2023**



Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Nias Selatan Tahun 2023.

**Tabel : Perbandingan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya dan Target RPJMD**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
-------------	----------------	----------------	-------------------------

15%	11,12%	13,89%	76,47%
-----	--------	--------	--------



Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami sedikit penurunan dengan selisih 2,69%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target sebesar 15%, realisasi tahun 2023 masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

Pada hakekatnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Namun ketersediaan anggaran yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan program air bersih ini. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan air bersih ini adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan dukungan anggaran dalam melaksanakan program air bersih.
- Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi terhadap air bersih tidak berbanding lurus dengan kemampuan keuangan daerah.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tetap mengupayakan pemenuhan sarana air bersih tiap tahunnya dengan memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang mau terlibat dalam pengadaan air bersih sehingga kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi.

**Tabel : Daftar Pembangunan SPAM Tahun 2023**

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan Broncaptering Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	272	SR
2	Pembangunan Broncaptering Desa Hililaza Kec. Teluk Dalam	Hililaza	Teluk Dalam	96	SR
3	Pembangunan Broncaptering Desa Idala Jaya	Idala Jaya Hilisimaetano	Maniamolo	168	SR

	Hilisimaetano Kec. Maniamolo				
4	Pembangunan Broncaptering Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	277	SR
5	Pembangunan Broncaptering Desa Hiliamaetaniha Kec. Luahagundre Maniamolo	Hiliamaetaniha	Luahagundre Maniamolo	167	SR
6	Pembangunan Broncaptering Desa Lolozaria Kec. Amandraya	Lolozaria	Amandraya	85	SR
7	Pembangunan Broncaptering Desa Hilimagiao Kec. Aramo	Hilimagiao	Aramo		SR
8	Pembangunan Broncaptering Desa Oikhodabalaekha Kecamatan Lahusa	Oikhodabalaekha	Lahusa	73	SR
9	Pembangunan Broncaptering Desa Hilizamurugo Kec. Susua	Hilizamurugo	Susua	48	SR
10	Pembangunan Broncaptering Desa Umbunasi Kec. Umbunasi	Umbunasi	Umbunasi		SR
11	Pembangunan Broncaptering Desa Sisiwa Ewali Kec. Uluidanotae	Sisiwa Ewali	Uluidanotae		SR
12	Pembangunan Broncaptering Desa Suka Maju Kecamatan O'ou	Suka Maju	O'ou	56	SR
13	Pembangunan Broncaptering Desa Hilimbowo Kec. O'ou	Hilimbowo	O'ou	82	SR
14	Pembangunan Broncaptering Desa Lolomaya Kec. O'ou	Lolomaya	O'ou	70	SR
15	Pembangunan Broncaptering Desa Simandraolo Kec. O'ou	Simandraolo	O'ou	107	SR

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Nias Selatan Tahun 2023

### 3. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

**Tabel : Realisasi Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik  
Tahun 2023**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	45%	39,78%	88%

Ketersediaan jaringan irigasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, diantaranya : memasok kebutuhan air bagi tanaman terutama tanaman padi yang membutuhkan air dalam jumlah banyak, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat pada musim kemarau, berperan dalam menurunkan suhu tanah, serta mengurangi kerusakan kontur tanah. Kebutuhan akan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan cukup tinggi karena mayoritas masyarakat Nias Selatan bekerja di sektor pertanian tanaman padi dengan luas areal 22.262 Ha. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih juga masih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan jaringan irigasi menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 45%, sedangkan yang terealisasi atau tercapai hanya 39,79% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang dibangun}}{\text{Luas daerah irigasi keseluruhan}} \times 100\%$$

Maka hasil yang diperoleh terkait persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah :

$$\frac{4.208 \text{ Ha}}{10.577 \text{ Ha}} \times 100\% = 39,78\%$$

Dari perhitungan diatas, diperoleh bahwa luas daerah irigasi yang dibangun pada tahun 2023 yakni seluas 4.208 Ha, sedangkan total



luas keseluruhan daerah irigasi adalah 10.577 Ha sehingga diperoleh persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 39,78%. Hasil ini masih belum mencapai atau memenuhi target yang direncanakan sebesar 50,05%.

**Tabel : Perbandingan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
45%	39,78%	39,78%	52,04%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2023 hampir sama dengan realisasi tahun 2022, hal ini dikarenakan bahwa pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2023 masih menggunakan data realisasi tahun 2022 yang berfokus pada pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun pada tahun 2022. Namun secara umum, capaian tahun 2023 sebesar 39,78% masih belum memenuhi target perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 45% dan target akhir RPJMD sebesar 52,04%.

Pembangunan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun capaiannya masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023. Beberapa hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan jaringan irigasi antara lain :

- ❖ Ketersediaan anggaran yang kurang mencukupi pembiayaan pembangunan irigasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mengingat alokasi anggaran yang ada terbatas dan juga digunakan dalam pembangunan infrastruktur lainnya selain jaringan irigasi.

Namun demikian, upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan irigasi dengan kondisi baik terus dilakukan melalui perencanaan

pembangunan tiap tahunnya yang selalu mengakomodir pembangunan irigasi sebagai skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan setiap tahun.

#### 4. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Kebutuhan masyarakat terhadap penerangan listrik PLN masih sangat tinggi, terutama di wilayah terpencil dan terisolasi. Elektrifikasi listrik PLN merupakan salah satu bentuk pemerataan pembangunan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Target indikator “Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN” yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bupati tahun 2023 dan yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026 yakni sebesar 60%.

**Tabel : Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN”**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	60%	58,54%	97%

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN adalah sebanyak 37.086 rumah tangga, sedangkan total keseluruhan rumah tangga yakni sebanyak 63.356 rumah tangga. Oleh karena itu, diperoleh persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dengan rumus berikut :

$$\frac{RT_{PLN}}{RT} \times 100\%$$

*Ket:*

$$RT_{PLN} = \text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN}$$

$$RT = \text{Jumlah Rumah Tangga}$$

Maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{37.086}{63.356} \times 100\% = 58,54\%$$

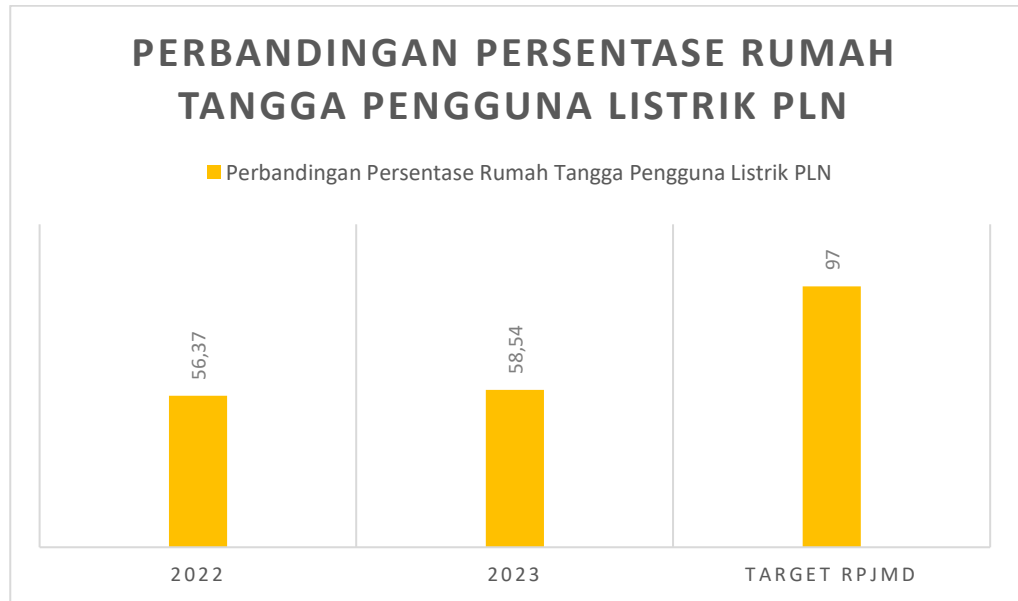
Sehingga diperoleh persentase sebesar 58,54%. Hasil capaian kinerja yang didapatkan ini hampir target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan PLN dalam menyediakan pasokan dan jaringan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terkoneksi dengan jaringan listrik PLN, dukungan dari Pemerintah Pusat dalam menyediakan sarana prasarana pendukung termasuk program meteran listrik gratis yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Namun masih juga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain : pembebasan lahan yang bermasalah, ketersediaan tiang listrik dan sarana prasana listrik yang terbatas pengadaannya tiap tahun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan listrik yang cukup tinggi.

**Tabel : Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan target RJPMD**

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Persentase Capaian
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	60%	58,54%	56,37%	97%

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 56,37%, realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 58,54%. Dari tahun 2022 hingga 2023 terdapat penambahan jumlah rumah

tangga pengguna listrik PLN sebanyak 1.368 rumah tangga. Perbandingan peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



## 5. Rasio Rumah Layak Huni

Tabel : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Rasio Rumah Layak Huni	0,150	0,1143	76%

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan keselamatan penghuni. Kebutuhan masyarakat Nias Selatan terhadap kepemilikan rumah layak huni masih tinggi, terutama masyarakat miskin ekstrim dan kurang mampu yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi. Pada tahun 2023 telah ditetapkan rasio rumah layak huni sebesar 0,150 dan terealisasi sebesar 0.1143 dengan tingkat persentase capaian sebesar 76%.

Untuk mendapatkan hasil rasio rumah layak huni dapat diukur melalui formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (RLH)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

dan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{41.200 \text{ unit}}{360.531 \text{ jiwa}} \times 100\% = 0,1143$$

Berdasarkan perhitungan diatas, hingga pada tahun 2023 telah diintervensi sebanyak 41.200 unit rumah layak huni di wilayah kabupaten nias selatan dan jumlah total penduduk sebanyak 360.531 jiwa. Sehingga diperoleh rasio rumah layak huni yaitu 0,114 dengan rincian 19 unit tambahan rumah layak huni yang dibangun/ditangani oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023 yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) APBN dari Pemerintah Pusat dan peningkatan status rumah layak huni yang didata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Hingga tahun 2023, terdapat 41.200 unit rumah layak huni di Kabupaten Nias Selatan.

**Tabel : Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
0,150	0,1143	0,114	0,057

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023, realisasi rasio rumah layak huni telah hampir memenuhi target dengan tingkat capaian 76%. Hal yang sama juga berlaku apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2022 dengan perbandingan 0,0003 dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026 sebesar 0.057 maka capaian pada tahun 2023 ini telah melebihi target akhir RPJMD. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) APBN yang

diperuntukkan untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrim dan kurang mampu.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian target terhadap rasio rumah layak huni antara lain :

- ❖ Melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan target rasio rumah layak huni sehingga berdampak pada semakin meningkatnya jumlah unit rumah layak huni yang tersedia di wilayah kabupaten nias selatan.
- ❖ Memanfaatkan dana bantuan hibah, dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna membiayai pembangunan rumah layak huni
- ❖ Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta dan organisasi nirlaba yang bergerak dalam membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak rumah layak huni yang tersedia bagi masyarakat Nias Selatan.

### **Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif**

**TABEL : REALISASI KINERJA MISI 3 TAHUN 2023**

<b>Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif</b>					
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing</b>					
<b>3</b>	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	57,01	57	100%
<b>4</b>	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	72	72,5	100,6%
<b>5</b>	Meningkatnya	Indeks Pengeluaran	62,32	61,86	99,26%

kesejahteraan sosial masyarakat				
---------------------------------	--	--	--	--

Pada Misi 3 Kepala Daerah yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian Misi tersebut. Adapun penjelasan terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Indeks Pendidikan

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen penting dalam menyusun indeks pembangunan manusia. Indeks Pendidikan juga mencerminkan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan telah dijalankan dengan baik. Selain itu, Indeks Pendidikan menjadi barometer dalam mengukur daya saing/kompetensi sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Semakin tinggi indeks pendidikan, maka semakin kuat daya saing SDM dan semakin bagus kualitas pendidikan. Di bidang pendidikan, Kabupaten Nias telah menetapkan indikator Indeks Pendidikan sebagai salah satu acuan untuk mengukur kualitas pendidikan dan daya saing SDM. Dibawah ini dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2023 :

**Tabel : Realisasi Kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2023**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	57,01	57	100%

Sumber data : Dinas Pendidikan Nias Selatan Tahun 2023

Pada tabel diatas, apabila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 57,01, maka realisasi kinerja indeks pendidikan tahun 2023 telah

mencapai atau memenuhi target tersebut dengan tingkat persentase capaian sebesar 100%. Artinya bahwa kinerja ini telah berhasil dicapai dalam memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Nias Selatan, diperoleh data Indeks Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 yaitu : 71,00 dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah yakni 43,20. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung Indeks Pendidikan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$$

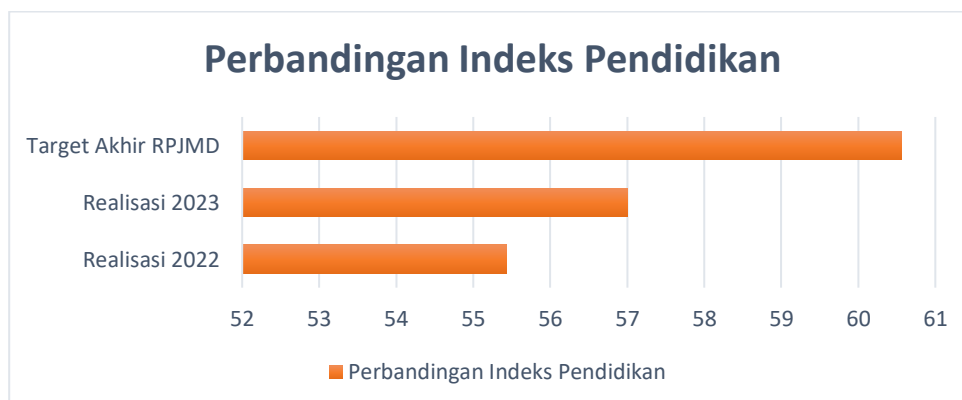
Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{71,00 + 43,20}{2} = 57,1$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 yaitu 57,1 atau dapat dibulatkan menjadi 57.

**Tabel : Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2023 dengan Tahun sebelumnya dan target RPJMD**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2026
57,01	57	55,43	60,56





Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target tersebut. Hal ini menjadi sebuah keberhasilan untuk mencapai kualitas pendidikan terbaik di Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 55,43, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,43 dari realisasi tahun 2022. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2023 masih belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 60,56. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Nias Selatan terkhusus Dinas Pendidikan untuk dapat berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun ke tahun.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- ❖ Melakukan pembenahan dan pembangunan sarana prasarana, infrastruktur termasuk gedung sekolah yang layak terutama di wilayah pedesaan terpencil.
- ❖ Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan guru bersertifikat (PPG) dengan harapan semakin banyak guru yang berkualitas baik maka semakin membaik kualitas pendidikan.
- ❖ Mendorong sekolah-sekolah untuk mengoptimalkan dana bantuan operasional sekolah sesuai peruntukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan melakukan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dengan melibatkan Inspektorat dalam mengaudit keuangan sekolah.

**Gambar : Dokumentasi Capaian Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2023**



Keterangan : Pembangunan ruang UKS PAUD



Keterangan : Pembangunan gedung perpustakaan SD



Keterangan : Pembangunan Gedung Laboratorium SMP

**Gambar : Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan (Tenaga Pendidik) Tahun 2023**



Keterangan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD



Keterangan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD



Keterangan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP

## 2. Indeks Kesehatan

Tabel : Realisasi Kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2023

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	72	66,63	92%

Indeks kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat. Ada 24 indikator kesehatan yang mempengaruhi Indeks Kesehatan dengan nilai korelasi UHH (Usian Harapan Hidup) yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan

neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa.

Di Kabupaten Nias Selatan, Indeks Kesehatan menjadi salah satu indikator kinerja Bupati untuk mewujudkan sasaran strategis “meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan” dan Misi ke-3 (tiga) Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif. Pada tahun 2023, target indikator Indeks Kesehatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati yaitu 72. Untuk mencapai Indeks Kesehatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan formulasi berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \times 100\%$$

Ket:

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH<sub>min</sub> = 25; AHH<sub>maks</sub>=85

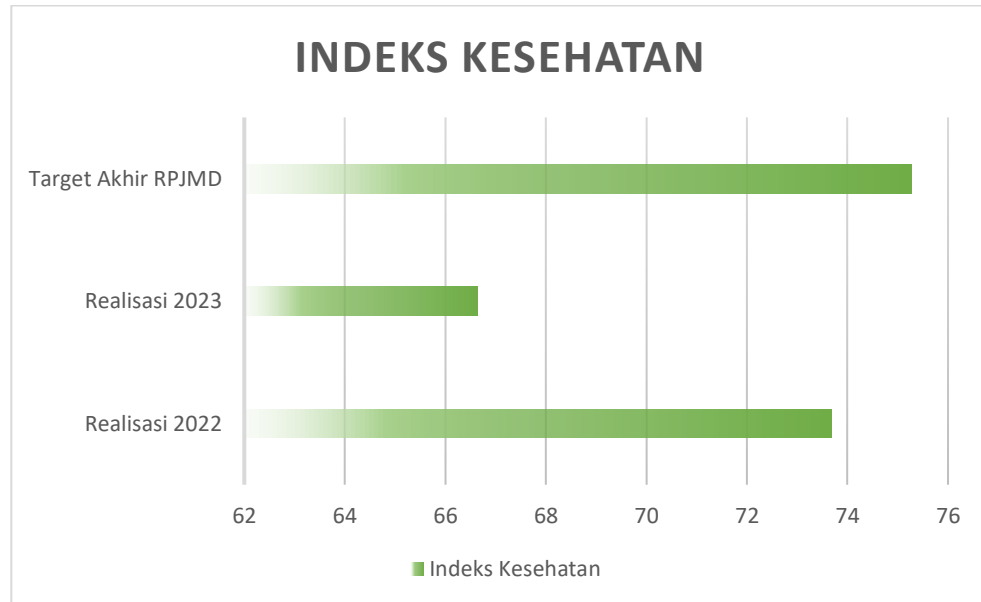
Dengan menggunakan data angka harapan hidup Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 sebesar 64,98 dapat dihitung Indeks Kesehatan sebagai berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{64,98 - 25}{85 - 25} \times 100 = 66,63$$

Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil indeks kesehatan yaitu 66,63. Capaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 72. Meskipun demikian, realisasi tersebut telah hampir mendekati target dengan persentas capaian sebesar 92%.

**Tabel : Perbandingan Indeks Kesehatan**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
72	66,63	73,68	75,28



Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 73,68, Indeks Kesehatan 2023 sedikit mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya angka harapan hidup nias selatan tahun 2023 sebesar 64,98 dibandingkan dengan angka harapan hidup tahun 2022 yang mencapai 69,21. Banyak hal yang melatar belakangi angka harapan hidup di suatu daerah pada posisi tinggi atau rendah antara lain :

- ❖ Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pendidikan, dan pendapatan yang digambarkan dalam pedapatan domestik regional bruto (PDRB).
- ❖ Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan terhadap kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.

- ❖ Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik baik secara kualitas maupun kuantitas juga menjadi hal yang krusial pada terjaminnya kesehatan masyarakat.

Angka usia harapan hidup tidak tercapai dapat dikaitkan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Angka kematian pada bayi

Pada tahun 2023, dilaporkan ada 4 kasus kematian pada bayi baru lahir. Angka kematian pada bayi ini memang lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. namun demikian terjadinya kasus kematian pada bayi menjadi hal yang harus terus dievaluasi dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi sehingga kedepan kita dapat menekan angka kejadian kematian pada bayi.

2. Penyakit terbesar dalam satu tahun terakhir seperti:

✓ Gastritis

Angka penyakit Gastritis dalam satu tahun terakhir sebesar 6.570

✓ Hipertensi

Angka penyakit Hipertensi dalam satu tahun terakhir sebesar 4.745

✓ Diabetes

Angka penyakit Diabetes dalam satu tahun terakhir sebesar 923.

3. Kasus Kurang Gizi seperti stunting dan wasting pada anak. Dimana prevalensi stunting sebesar 7 % dan wasting sebesar 5 %. Sekalipun capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan. tetapi Dinas Kesehatan akan terus berupaya agar

angka kejadian / prevalensi kekurangan gizi pada anak menjadi rendah.

4. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap masih rendah yaitu 20 %, masih sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 71 %. Hal ini disebabkan banyak hal yaitu system pelaporan dari UPTD di bawah Dinas Kesehatan, juga perilaku dan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi serta akses fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata.
5. Jumlah dokter, dokter spesialis yang belum mencukupi untuk kebutuhan pelayanan di Kabupaten Nias Selatan
6. Sarana serta prasarana kesehatan yang masih harus terus dilengkapi.

Keberhasilan pencapaian target pada indikator Indeks Kesehatan tidak terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Mendorong dinas kesehatan dan UPTD Puskesmas untuk melaksanakan program-program kesehatan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk menyukseskan program-program kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seperti Program Indonesia Sehat/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pelayanan BPJS Kesehatan yang dapat melayani kebutuhan seluruh masyarakat Nias Selatan.
- ❖ Meningkatkan sarana prasana dan infrastruktur kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing.

**Gambar : Potret Pelayanan Kesehatan Selama Tahun 2023**



Keterangan : Pemantauan tumbuh kembang bayi, melalui pengukuran BB da TB Bayi



Keterangan : Pelayanan Imunisasi pada anak



Keterangan : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil





Keterangan : Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir



Pelayanan Posyandu Bayi



Keterangan : Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia

### 3. Indeks Pengeluaran

Definisi terhadap indeks pengeluaran atau disebut dengan pengeluaran per kapita penduduk adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota keluarga terhadap kebutuhan barang dan jasa yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran penduduk dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap pengeluaran total maka semakin mebaik tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, indeks pengeluaran menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Nias Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Indeks pengeluaran merupakan salah satu indikator kinerja Bupati Nias Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berikut dapat dilihat capaian Indeks Pengeluaran Nias Selatan tahun 2023 :

**Tabel : Realisasi Kinerja Indeks Pengeluaran Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62,32	61,86	99,26%

Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023 telah ditetapkan target Indeks Pengeluaran sebesar 62,32 dan terealisasi sebesar 61,86. Perbandingan Indeks Pengeluaran dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel : Perbandingan Indeks Pengeluaran**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
60,75	61,86	60,75	67,13



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, target Indeks Pengeluaran Tahun 2023 yaitu 60,75 dan terealisasi sebesar 61,86 dengan tingkat persentase capaian sebesar 99,26%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi 2023 sedikit mengalami peningkatan. Namun bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi 2023 masih belum berhasil mencapai target tersebut.

**Gambar : Rata-rata pengeluaran per kapita/bulan**



Sumber : BPS Nias Selatan Tahun 2023

Walaupun capaian telah sesuai atau melebihi target, tetap harus diupayakan pengeluaran per kapita atau indeks pengeluaran Nias Selatan harus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Nias Selatan semakin lebih baik atau semakin sejahtera. Beberapa upaya yang mesti dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian terhadap indeks pengeluaran ini sebagai berikut :

- ❖ Menekan laju inflasi dengan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap harga-harga barang di pasar tradisional.
- ❖ Memberikan stimulan peningkatan daya beli ekonomi masyarakat melalui pencairan dana-dana bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat baik dana yang bersumber dari APBD melalui dana desa maupun dana yang berasal dari APBD Provinsi dan APBN yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

## Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif

### REALISASI KINERJA MISI 4 TAHUN 2023

Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif				
Tujuan 4 : Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
6 Meningkatkan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,2	3,65	114%
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	3,4	2,72	80%
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	7,2	5,47	75%

Pada Misi ke-4 (empat) Kepala Daerah yaitu Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif didukung

oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Penjelasan terhadap realisasi dan capaian terhadap ke-tiga indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

**Tabel : Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Nias Selatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,2	3,65	114%

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dalam menganalisa perekonomian masyarakat apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi secara riil diukur dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan perekonomian suatu wilayah atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, PDRB diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Kedua pendekatan ini dapat menyajikan komposisi data nilai tambah suatu wilayah dengan merinci sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya. Sedangkan pada pendekatan pengeluaran menyajikan tentang penggunaan dari nilai tambah ekonomi tersebut.

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu indikator kinerja Bupati Nias Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati tahun 2023. Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 adalah dalam rentang 0,61 – 1,79. Menurut data BPS

dalam Kabuapten Nias Selatan Dalam Angka 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan terealisasi pada angka 3,08. Apabila dibandingkan dengan target LPE 2023, maka realisasi nilai 3,08 ini telah memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 sebesar 2,02 maka realisasi LPE tahun 2023 ini merupakan realisasi yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

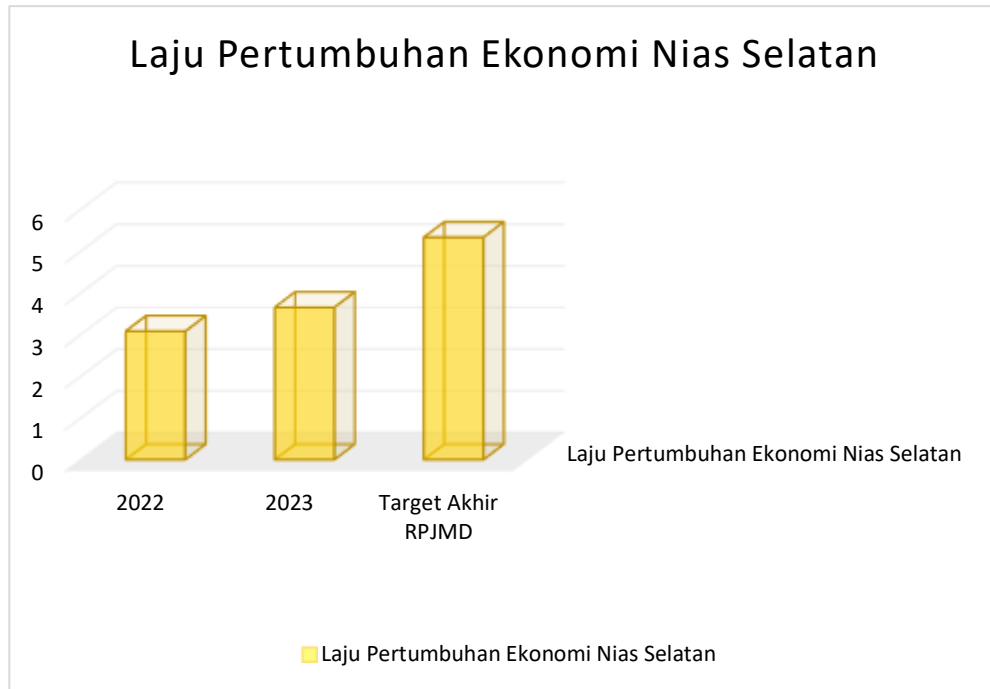
Perbandingan antara target dan realisasi laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:



Sumber : BPS Nias Selatan

Tabel :Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
3,2	3,65	3,08	5,33



Berdasarkan grafik diatas, realisasi LPE tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2022, namun masih belum cukup memenuhi target akhir RPJMD. Pada tahun 2023, produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Nias Selatan mencapai nominal Rp 8.574,98 (miliar rupiah). Pencapaian terhadap realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi ini tidak terlepas dari kegiatan perekonomian masyarakat Nias Selatan yang sedikit mengalami pertumbuhan walaupun tidak terlalu signifikan. Kegiatan perekonomian masyarakat Nias Selatan meliputi 17 lapangan usaha antara lain :

- 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Pengadaan listrik dan gas;
- 5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- 6) Konstruksi;
- 7) Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
- 8) Transportasi dan pergudangan;
- 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- 10) Informasi dan komunikasi;

- 11) Jasa keuangan dan asuransi;
- 12) Real estat;
- 13) Jasa perusahaan;
- 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- 15) Jasa pendidikan;
- 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Jasa lainnya.

## 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian

**Tabel : Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Tahun  
2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	3,4	2,72	80%

Laju pertumbuhan ekonomi pertanian atau dengan sebutan lain Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah turut berkontribusi terhadap pengembangan potensi pertanian dan kemajuan pembangunan di sektor pertanian suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertanian sebagai salah indikator penting dalam RPJMD 2021-2026 dan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati Tahun 2023. Alasan penting bahwa LPE Pertanian menjadi indikator kinerja Bupati adalah bahwa sektor pertanian berperan penting dan menjadi kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data BPS dalam laporannya “Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2023” bahwa PDRB Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 sebesar 4.629,30



miliar rupiah, sektor pertanian menjadi penyumbang/kontributor terbesar dengan peranan mencapai 44,72%. Hal ini sejalan dengan lapangan usaha masyarakat yang mayoritas bersumber dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian maka dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$$

*Ket:*

*PDRB atas dasar harga konstan*

*t= tahun berjalan*

*t-1= tahun sebelumnya*

*IP= Kategori Pertanian*

Berdasarkan rumus diatas, maka PDRB Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2023 sebesar 2.162,85 milyar rupiah dan PDRB pada tahun sebelumnya 2022 sebesar 2.105,63 milyar rupiah. Dengan menggunakan kedua data tersebut maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian sebagai berikut :

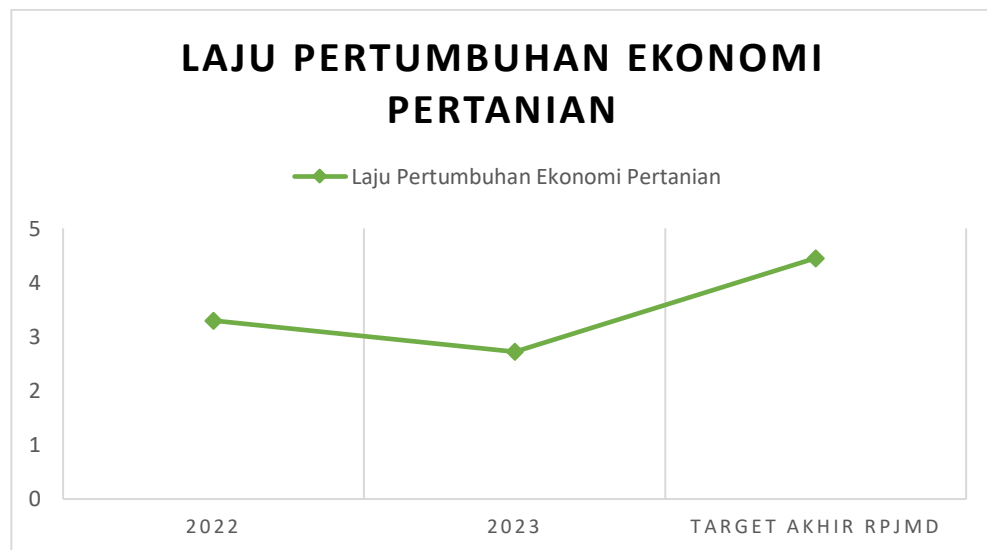
$$\frac{2.162,85 - 2.105,63}{2.105,63} \times 100\% = 2,72$$

Dari perhitungan diatas maka diperoleh PDRB sektor Pertanian atau LPE Pertanian pada tahun 2023 yaitu 2,72. Realisasi tahun 2023 diatas telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu pada rentang 1,04-2,22. Perbandingan antara target dan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian adalah sebagai berikut :

**Tabel : Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Akhir RPJDM 2026
3,4	3,3	2,72	4,45

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2023 hampir memenuhi target pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian LPE Pertanian 2023 sedikit mengalami penurunan disebabkan menurunnya produktivitas beberapa produk pertanian (gagal panen, diserang hama penyakit, dan faktor cuaca ekstrim). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian 2023 masih belum memenuhi target tersebut.



Pencapaian terhadap realisasi LPE Pertanian 2023 ini tidak terlepas dari kinerja Dinas Pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian dengan melaksanakan berbagai program-program pendukung usaha pertanian masyarakat. Dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pertanian tahun 2023 menjadi bukti bahwa terjadinya peningkatan jumlah produksi komoditi pertanian. Implikasinya adalah dengan peningkatan produksi pertanian maka telah dapat mampu menjamin ketersediaan pangan dan berdampak baik terhadap perekonomian keluarga petani.

Dengan tercapainya target kinerja LPE pertanian ini, maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selalu mendukung kemajuan perekonomian masyarakat di sektor pertanian dengan cara meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pertanian dan teknologi hasil pertanian

yang mutakhir sehingga peningkatan jumlah produksi pertanian semakin naik dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada sektor pertanian

**Gambar : Potret Pertanian Kab. Nias Selatan**



Keterangan : Lahan Pertanian Sawah dan Jagung



Keterangan : Peternakan Babi dan Sapi



Keterangan : Pembangunan Jalan Pertanian

### 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata

**Tabel : Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata  
Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	7,2	5,47	75%

Laju pertumbuhan ekonomi pariwisata atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata. Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan peranan penting terhadap penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa destinasi wisata yang cukup terkenal di Nias Selatan adalah wisata pantai, wisata bahari, dan wisata budaya. Destinasi wisata pantai di Nias Selatan yang terkenal baik di mancanegara maupun domestik adalah Pantai Lagundri dan Sorake. Di Pantai Sorake setiap tahunnya diselenggarakan event olahraga selancar yang disebut “Surfing Nias Pro” dan telah masuk dalam kalender event tahunan asosiasi selancar dunia / *World Surfing League* (WSL). Selain Pantai Lagundri dan Sorake, wilayah Pulau-pulau Batu juga menjadi destinasi unggulan wisata bahari yang terkenal dengan pantai pasir putih dan keindahan lautnya sehingga menarik minat wisatawan baik mancanegara dan domestik untuk berkunjung dengan melakukan aktivitas berjemur (*sun bathing*) dan menyelam (*diving*).

Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata terdiri dari akomodasi dan makan minum di sektor pariwisata. Oleh karena itu, Laju pertumbuhan ekonomi pariwisata atau PDRB sektor pariwisata menjadi salah satu indikator kinerja Bupati dalam RPJMD 2021-2026

dan telah ditetapkan juga sebagai salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023. PDRB pariwisata dapat dihitung dengan formulasi berikut :

$$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100$$

*Ket:*

*PDRB atas dasar harga konstan*

*T = tahun berjalan*

*t-1= tahun sebelumnya*

*IP = Kategori Pariwisata*

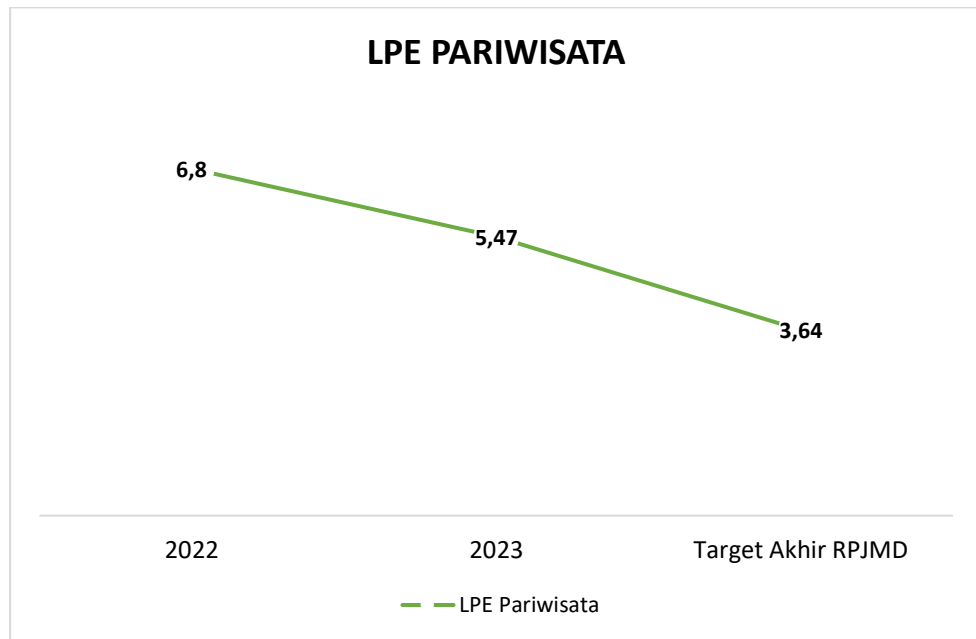
Berdasarkan rumus diatas maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata. Menurut data BPS Nias Selatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADH) sektor pariwisata pada tahun 2023 adalah sebesar 97,56 miliar rupiah dan tahun 2022 sebesar 92,51 miliar rupiah sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

$$\frac{97,56 - 92,51}{92,51} \times 100 = 5,47$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 yaitu 6,8. Realisasi tersebut telah melebihi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1,53. Berikut perbandingan antara target dan realisasi LPE sektor pariwisata :

**Tabel : Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
7,2	5,47	6,8	3,64



Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023, maka realisasi LPE sektor pariwisata tahun 2023 hampir mencapai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian 2023 sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat dan trend naik harga bahan pokok. Bila dibandingkan dengan target RPJMD, capaian 2023 telah melampaui target RPJMD yang ditetapkan. Target RPJMD tersebut ditetapkan pada masa Covid-2019 periode 2020-2021 sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, dampaknya pada saat itu juga target RPJMD ditetapkan menyesuaikan kondisi perekonomian pada saat covid 19.

Adapun faktor pendukung tercapainya realisasi LPE Pariwisata tahun 2023 antara lain :

- a. Penyelenggaraan event Nias Pro 2023 event Nias Pro tahun 2023 sangat mempengaruhi pencapaian target Laju pertumbuhan ekonomi (penyediaan akomodasi dan makan minum) pariwisata. Penyelenggaraan event selama 7 hari ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel di Kabupaten Nias Selatan.

- b. Penyelenggaraan event/festival tingkat desa dan tingkat kecamatan sehingga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.
- c. Mempromosikan Pariwisata Nias Selatan melalui platform media sosial dengan melibatkan para konten kreator yang memiliki pengikut dalam jumlah besar.
- d. Meningkatnya kualitas fasilitas dan aksesibilitas terhadap destinasi wisata yang dikunjungi dan bertambahnya destinasi wisata baru.

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata telah dapat memberikan dampak positif baik bagi pendapatan masyarakat maupun penerimaan pajak oleh pemerintah. Namun demikian, masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain :

- a. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dengan menetapkan kebijakan atau regulasi terkait retribusi masuk objek wisata.
- b. Mendorong kesadaran para pelaku usaha wisata untuk mengurus ijin usaha dan membayar pajak dan retribusi.
- c. Meningkatkan sistem pemungutan pajak yang berbasis online, selama ini masih berbasis konvensional/manual.
- d. Belum maksimalnya kontribusi sektor usaha jasa pariwisata terhadap PAD Nias Selatan karena belum ada regulasi tentang retribusi masuk objek wisata;
- e. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha jasa pariwisata untuk mengurus ijin usaha;
- f. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membayar pajak hotel dan restoran;
- g. Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran masih konvensional (manual).

## Gambar : Dokumentasi Kegiatan Pariwisata Nias Selatan Tahun 2023

### Kegiatan Pelaksanaan Nias Pro 2023



### Malam Pesona Budaya Nias Selatan



Sp





**Maniamolo Fest 2023**



## Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

Tabel : Realisasi Kinerja Misi 5

Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat					
Tujuan : Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan					
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%	99,62%	99,62%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	190	190,52	99,7%
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%
		Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%

Pada Misi ke-5 (lima) Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD yaitu Memberi Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat, didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Penjelasan terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Misi 5 ini adalah sebagai berikut:

## 1. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan

**Tabel : Realisasi Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%	99,62%	99,62%

Dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan turut mewujudkan hal tersebut sehingga rasa aman dan nyaman ini menjadi salah satu indikator kinerja Bupati dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah direpresentasikan oleh Satuan Polisi Pamog Praja dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP bersama jajaran personilnya turut berperan aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan keamanan dan ketertiban. Pada tahun 2023 telah ditargetkan persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang diselesaikan adalah sebesar 100%.

Realisasi terhadap indikator kinerja ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung persentase gangguan ketertiban yang diselesaikan. Menurut data dari Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, Jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 185 pengaduan dan jumlah pengaduan yang diselesaikan adalah sebanyak 167 pengaduan, sedangkan pengaduan yang belum terselesaikan adalah sebanyak 18

pengaduan. Maka persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan adalah sebesar 90,27% dengan perhitungan sebagai berikut:

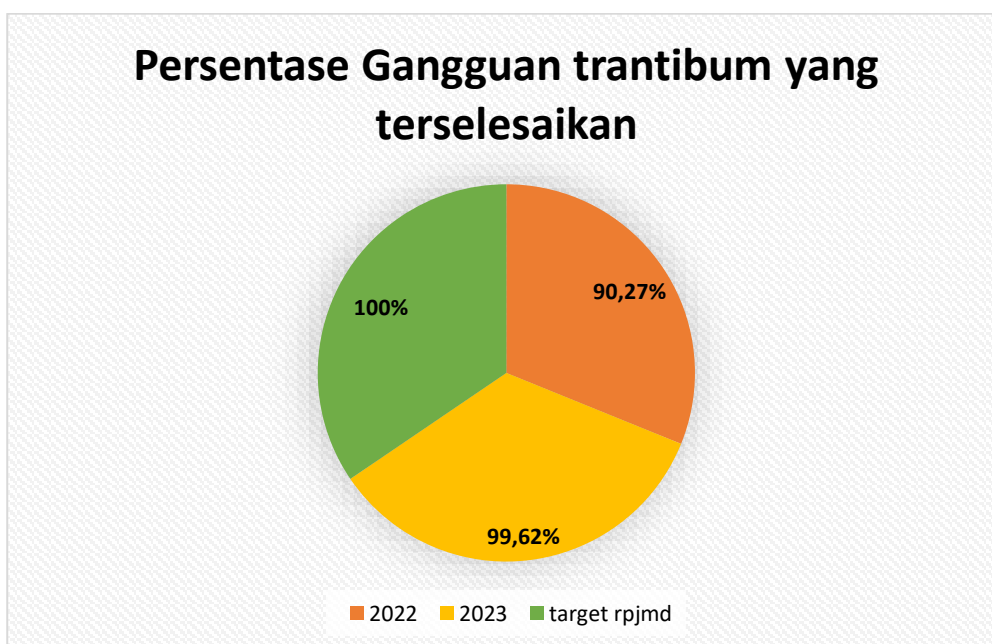
$$\frac{261}{262} \times 100\% = 99,62\%$$

Realisasi kinerja diatas telah hampir memenuhi target kinerja sebesar 100%. Meskipun masih terdapat 1 pengaduan yang belum tertangani, namun secara keseluruhan pengaduan masyarakat terkait gangguan trantibum telah direspon dan diselesaikan oleh Satpol PP Kabupaten Nias Selatan. Adapun jenis pengaduan yang diselesaikan antara lain :

- 1) Gangguan ketertiban sebanyak 205 pengaduan
- 2) Gangguan pelanggaran Perda dan perkara sebanyak 55 pengaduan.

**Tabel : Perbandingan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
100%	99,62%	90,27%	100%



Bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebanyak 167 pengaduan yang diselesaikan, realisasi 2023 mengalami peningkatan sebanyak 261 pengaduan yang terselesaikan. Namun, apabila dibandingkan dengan persentase target akhir RPJMD, realisasi 2023 sudah sangat mendekati pencapaian target akhir RPJMD tersebut dengan persentase 99,62%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi kinerja persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas SDM pengamanan Satpol PP dengan memberikan pelatihan rutin dalam merespon dan menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan tepat.
- Meningkatkan dukungan fasilitas dan sarana prasarana pengamanan yang memadai.
- Mengupayakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara rutin dengan menggelar operasi-operasi pengamanan berkala terutama pada hari-hari raya besar.

## 2. Indeks Resiko Bencana (IRBI)

**Tabel : Realisasi Kinerja Indeks Resiko Bencana**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Indeks Resiko Bencana (IRB)	190	190,52	99,7%

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Untuk mengukur tingkat resiko bencana mengalikan fungsi bahaya (*hazard*) dengan kerentanan (*vulnerability*) atau dengan rumus  $R = H \times V$ .

Indeks Resiko Bencana dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana pada suatu wilayah. Kondisi alam/topografi Kabupaten Nias Selatan pada umumnya terdiri dari bukit-bukit yang sempit dan terjal serta pegunungan dengan tinggi 0-800 meter di atas permukaan laut, dataran rendah sampai bergelombang sekitar 20%, tanah bergelombang sampai berbukit-bukit sebesar 28,8% dan berbukit sampai pegunungan sebesar 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Selain itu, Kabupaten Nias Selatan terdiri dari beberapa pulau-pulau dan didominasi oleh laut yang cukup luas.

Potensi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam di wilayah Kabupaten Nias Selatan tergolong tinggi. Adapun jenis bencana yang sering terjadi di Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Kebakaran Rumah
- Gempa Bumi
- Longsor
- Banjir bandang
- Angin puting beliung
- Gelombang tinggi
- Kebakaran hutan dan lahan
- Gelembung gas
- Tenggelam/hanyut

Oleh karena itu, Indeks Resiko Bencana menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2021-2026 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan penanggulangan bencana. Dengan menurunnya indeks resiko bencana, maka potensi terjadinya bencana di suatu daerah lebih kecil peluangnya, sedangkan apabila indeks resiko bencana tinggi maka peluang terjadinya bencana juga lebih besar terjadi di wilayah tersebut. Untuk

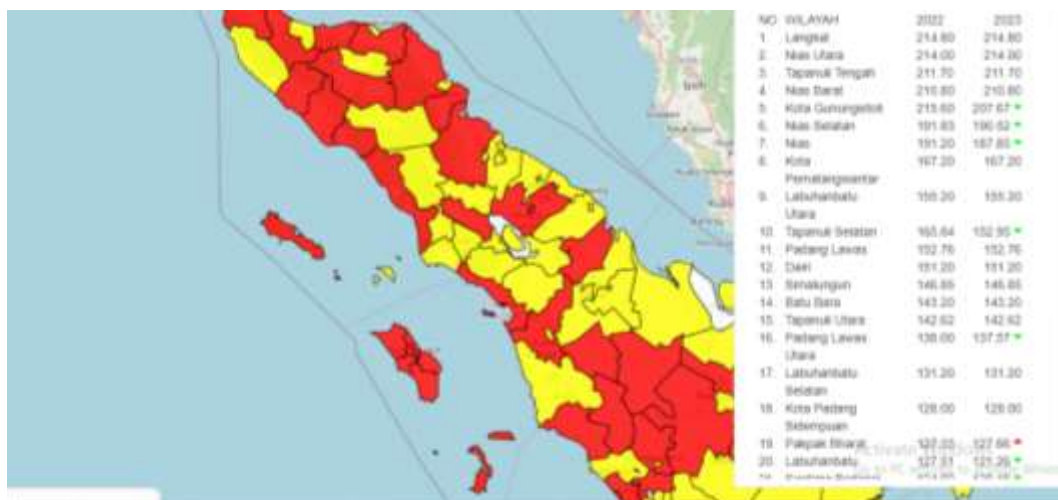
menekan indeks resiko bencana, maka Pemerintah Daerah memfokuskan pada upaya-upaya menurunkan resiko bencana di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja, Indeks Resiko Bencana ditargetkan sebesar **190**. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) R.I. tahun 2023, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan adalah **190,52** dengan persentase capaian 99,7%. Artinya bahwa trend resiko bencana di Nias Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi tahun 2023 telah melampaui penurunan dari target RPJMD sebesar 192. Hal ini tentu menjadi sebuah keberhasilan dalam aspek penanggulangan bencana di Nias Selatan. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator indeks resiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Indek Resiko Bencana**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2026
190	190,52	191,83	192

**Gambar : Peta Resiko Bencana Tahun 2023**



Sumber Data : IRBI 2023 BNPB



Untuk mengurangi resiko bencana di wilayah Nias Selatan maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana yang siap siaga, terampil, dan profesional.
- Melakukan kajian resiko bencana (risk assesment) secara berkala dan menyusun peta resiko bencana.
- Melakukan pengelolaan resiko bencana melalui upaya pencegahan, mitigasi, pengalihan resiko bencana, dan penerimaan resiko bencana.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang penanggulangan bencana daerah melalui peraturan daerah.
- Menyediakan logistik untuk kondisi darurat bencana.
- Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara stakeholder dalam menanggulangi bencana.



### 3. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

**Tabel : Realisasi Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan tertib patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah berlaku, maka ditetapkan indikator kinerja Bupati “persentase perda dan perkada yang ditegakkan” dengan target sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, terdapat 3 Peraturan yang rutin ditegakkan oleh Satpol PP sehingga realisasi terhadap kinerja ini adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100\%$$

Maka perhitungannya adalah :

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

**Tabel : Perbandingan Realisasi Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
100%	100%	100%	100%



Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah dan perkada agar terwujud tertib patuh terhadap peraturan di wilayah Nias Selatan adalah :

- Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang memuat sanksi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tersebut dan memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan.
- Meningkatkan kapasitas petugas penegakan perda dan perkada untuk melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.
- Menyediakan fasilitas atau sarana prasarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan yang telah berlaku, baik secara offline (pamflet, papan pengumuman, dll) maupun online melalui platform media sosial.

#### 4. Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat Nias Selatan. Kehadiran Pemerintah dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat berupa *Search And Rescue* (SAR) dengan melakukan identifikasi lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi dan membawa korban kembali pada kondisi aman serta mendapatkan perawatan medis. Selain itu, proses evakuasi dapat juga berupa pemindahan warga/masyarakat dari zona beresiko bencana ke lokasi yang lebih aman.

Pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban bencana dapat dilakukan secara efektif apabila terdapat hal-hal yang diperlukan berikut :

- Sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat.
- Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman.
- Identifikasi data dasar tentang penduduk.
- Kebijakan atau peraturan tentang evakuasi.

Pada dokumen perjanjian kinerja Bupati Nias Selatan tahun 2023 telah ditetapkan target persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%. Untuk mendapatkan realisasi terhadap target tersebut maka dapat dihitung dengan formulasi berikut :

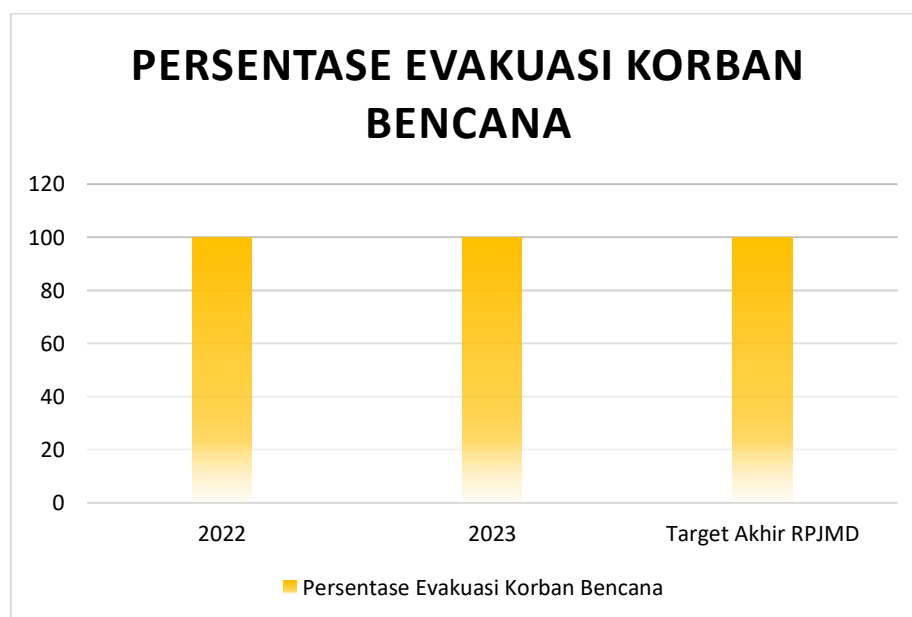
$$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam Yang Berhasil Diselamatkan dan Dievakuasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Korban Bencana Alam}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari BPBD Nias Selatan, jumlah korban bencana alam pada tahun 2023 adalah sebanyak 309 orang dan ke- 309 orang korban ini telah dilakukan evakuasi dan penyelamatan oleh BPBD Kabupaten Nias Selatan. Dengan menggunakan formulasi diatas, maka realisasi terhadap target kinerja dapat dihitung :

$$\frac{309}{309} \times 100\% = 100\%$$

**Tabel : Perbandingan Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Akhir RPJDM 2026
100%	100%	-	100%



Capaian terhadap kinerja diatas tidak terlepas dari upaya dan kinerja BPBD Nias Selatan yang cepat tanggap dan siap siaga dalam merespon kejadian bencana alam dan melakukan proses evakuasi dan penyelamatan korban secara cepat dan efektif dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana adalah :

- Meningkatkan kemampuan personil evakuasi dan penyelamatan korban bencana melalui pelatihan-pelatihan secara rutin dan berkala sehingga selalu siap sedia dalam melaksanakan evakuasi.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung evakuasi dan penyelamatan korban bencana.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan didukung oleh anggaran yang telah ditetapkan melalui P-APBD Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh anggaran dari total 87 Program (P-APBD). APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 adalah sebesar **Rp 1.592.005.031.775** dan terealisasi sebesar **Rp 1.592.005.031.775** dengan persentase realisasi APBD Tahun 2023 yaitu sebesar **100% (Sangat Tinggi)**. Penjabaran realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran I

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 telah menyajikan berbagai keberhasilan dan juga hambatan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun pertama pada RPJMD periode 2021 – 2026 sehingga ada beberapa kinerja yang tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan RPJMD. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 7 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja. Semua indikator kinerja telah diukur dengan menggunakan rumus/formulasi masing-masing sehingga diperoleh realisasi yang terukur dan valid. Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dinyatakan “berhasil” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, namun tidak bisa dipungkiri bahwa capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut telah didukung oleh upaya-upaya semua pihak terutama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam memastikan keberhasilan target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat berdampak baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Nias Selatan. Kendala, hambatan dan tantangan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja menjadi bahan dan fokus perbaikan di tahun berikutnya. Berbagai upaya tetap dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, termasuk upaya koordinasi yang aktif dan intensif dengan berbagai instansi pusat dan daerah terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai evaluator kinerja instansi pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun demi mewujudkan visi “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

# LAMPIRAN I



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,**  
**ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN**  
 Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	410.734.158.743,00	247.838.678.792,00	0,00	0,00
		362.078.229.023,40	221.017.083.686,00	0,00	0,00
1.01	<b>PENDIDIKAN</b>	290.973.431.078,00	48.851.196.036,00	0,00	0,00
		250.772.042.232,40	47.962.345.173,00	0,00	0,00
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	218.334.584.245,00	180.000.000,00	0,00	0,00
		183.147.412.721,00	179.460.360,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	216.043.305.245,00	0,00	0,00	0,00
		180.862.264.997,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	216.028.305.245,00	0,00	0,00	0,00
		180.847.266.997,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.499.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.499.000,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	171.253.200,00	0,00	0,00	0,00
		171.253.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	84.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	86.303.200,00	0,00	0,00	0,00
		86.303.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.341.200.800,00	180.000.000,00	0,00	0,00
		1.339.472.549,00	179.460.360,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.220.800,00	180.000.000,00	0,00	0,00
		1.220.000,00	179.460.360,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		360.102.190,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	218.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		217.224.940,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		628.125.419,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		586.711.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.711.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		564.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.210.075,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.210.075,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	72.638.846.833,00	48.671.196.036,00	0,00	0,00
		67.624.629.511,40	47.782.884.813,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.453.051.648,00	33.292.579.113,00	0,00	0,00
		38.296.498.546,40	33.027.099.340,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	27.322.178.761,00	0,00	0,00
		0,00	27.302.664.820,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	6.440.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
		5.940.000,00	258.426.704,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.462.000,00	1.262.500.000,00	0,00	0,00
		7.350.000,00	1.246.856.800,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.538.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.178.149.648,00	4.447.900.352,00	0,00	0,00
		38.024.669.946,40	4.219.151.016,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.272.795.385,00	14.030.096.595,00	0,00	0,00
		22.493.692.596,00	13.412.818.134,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	10.923.206.180,00	0,00	0,00
		0,00	10.878.019.927,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	459.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		459.375.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.690.800,00	157.500.000,00	0,00	0,00
		2.010.800,00	134.371.860,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.999.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.029.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.570.729.585,00	2.949.390.415,00	0,00	0,00
		21.794.277.996,00	2.400.426.347,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.999.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.271.119.800,00	1.348.520.328,00	0,00	0,00
		6.192.558.369,00	1.342.967.339,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	1.348.520.328,00	0,00	0,00
		0,00	1.342.967.339,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		179.189.476,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	69.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		69.918.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.871.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.793.450.293,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	641.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		641.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	641.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		641.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02	<b>KESEHATAN</b>	89.791.463.358,00	49.722.061.938,00	0,00	0,00
		82.851.896.200,00	51.474.489.078,00	0,00	0,00
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.875.870.589,00	270.542.433,00	0,00	0,00
		5.382.062.205,00	264.896.653,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.007.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.007.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	604.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		476.940.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	497.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		369.780.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.218.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.218.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.218.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.218.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.240.171.889,00	134.469.283,00	0,00	0,00
		2.685.142.739,00	134.166.653,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.321.300,00	0,00	0,00	0,00
		83.005.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	84.884.930,00	0,00	0,00
		0,00	84.750.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	723.692.831,00	49.584.353,00	0,00	0,00
		869.626.974,00	49.416.653,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	242.769.758,00	0,00	0,00	0,00
		242.769.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.190.388.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.489.740.465,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000,00	136.073.150,00	0,00	0,00
		17.750.000,00	130.730.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000,00	131.073.150,00	0,00	0,00
		17.750.000,00	130.730.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.209.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.124.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.176.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.091.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.893.700,00	0,00	0,00	0,00
		895.623.466,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	727.893.700,00	0,00	0,00	0,00
		895.623.466,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	82.915.092.769,00	49.451.519.505,00	0,00	0,00
		75.827.333.995,00	51.209.592.425,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.941.579.710,00	48.366.568.225,00	0,00	0,00
		11.789.117.666,00	50.266.053.326,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	9.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
		8.920.000,00	279.730.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	328.410.028,00	0,00	0,00
		0,00	328.410.028,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	72.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
		71.510.000,00	421.516.800,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	90.000.000,00	799.046.000,00	0,00	0,00
		89.270.000,00	798.196.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	710.085.070,00	7.107.500.000,00	0,00	0,00
		585.927.400,00	6.425.880.720,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	290.400.000,00	3.942.245.902,00	0,00	0,00
		290.070.000,00	3.937.274.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	34.317.134.295,00	0,00	0,00
		0,00	37.086.086.808,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	174.994.300,00	0,00	0,00	0,00
		174.994.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.131.869.100,00	0,00	0,00	0,00
		5.116.638.762,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.445.231.240,00	892.232.000,00	0,00	0,00
		5.433.997.204,00	889.128.970,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		17.790.000,00	99.830.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.762.483.059,00	860.297.530,00	0,00	0,00
		63.829.951.529,00	721.389.099,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.519.354.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.435.690.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.873.789.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.675.549.417,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	305.120.200,00	0,00	0,00	0,00
		305.120.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.234.313.970,00	0,00	0,00	0,00
		2.780.586.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.095.849.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.095.849.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.495.294.020,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.357.720,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	759.239.625,00	0,00	0,00	0,00
		718.992.571,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.242.280,00	0,00	0,00	0,00
		10.241.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.240.459.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.208.056.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	375.586.900,00	0,00	0,00	0,00
		373.171.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.351.076.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.339.892.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	275.841.900,00	0,00	0,00	0,00
		264.326.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.836.969.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.773.719.099,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.329.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.994.563.783,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.415.207.600,00	126.000,00	0,00	0,00
		3.285.197.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.694.396.960,00	0,00	0,00	0,00
		3.185.479.777,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.115.250.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.767.947.263,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.423.557.360,00	450.000,00	0,00	0,00
		1.672.703.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.963.274.789,00	801.771.530,00	0,00	0,00
		19.021.733.291,00	664.389.099,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7.616.696.260,00	0,00	0,00	0,00
		7.153.207.718,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.170.284.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.920.092.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	222.197.600,00	57.000.000,00	0,00	0,00
		222.094.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	290.051.795,00	0,00	0,00	0,00
		132.377.640,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	149.372.400,00	950.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	211.030.000,00	224.653.750,00	0,00	0,00
		208.264.800,00	222.150.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	139.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.964.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	197.500.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	71.760.000,00	24.653.750,00	0,00	0,00
		69.300.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	2.000.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.642.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.000.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.642.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.000.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.642.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	19.637.129.593,00	148.664.817.837,00	0,00	0,00
		18.235.329.479,00	121.019.940.679,00	0,00	0,00
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.666.910.807,00	430.921.600,00	0,00	0,00
		3.091.442.398,00	212.692.600,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.797.395,00	0,00	0,00	0,00
		29.659.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.460.865,00	0,00	0,00	0,00
		7.429.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.423.125,00	0,00	0,00	0,00
		7.382.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.445.880,00	0,00	0,00	0,00
		7.402.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.467.525,00	0,00	0,00	0,00
		7.445.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	171.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.350.578,00	0,00	0,00	0,00
		188.431.204,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69.650.578,00	0,00	0,00	0,00
		47.552.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	229.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.879.204,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.562.780.264,00	230.921.600,00	0,00	0,00
		1.555.146.216,00	212.692.600,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.214,00	0,00	0,00	0,00
		9.409.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.600.000,00	230.921.600,00	0,00	0,00
		27.600.000,00	212.692.600,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.032.050,00	0,00	0,00	0,00
		251.020.480,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.148.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.439.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.013.002.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.009.177.336,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		553.372.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.662.300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		509.000.000,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.010.882.570,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		593.233.078,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.127.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.765.618,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	664.755.570,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		368.671.860,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.795.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	242.375.000,00	7.974.442.828,00	0,00	0,00
		241.460.800,00	7.743.403.636,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	111.975.000,00	7.324.442.828,00	0,00	0,00
		111.625.000,00	7.095.953.656,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	111.975.000,00	7.324.442.828,00	0,00	0,00
		111.625.000,00	7.095.953.656,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.400.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
		129.835.800,00	647.449.980,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	130.400.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
		129.835.800,00	647.449.980,00	0,00	0,00
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	105.679.000,00	19.196.106.264,00	0,00	0,00
		37.788.500,00	16.667.769.931,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	105.679.000,00	19.196.106.264,00	0,00	0,00
		37.788.500,00	16.667.769.931,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	105.679.000,00	19.196.106.264,00	0,00	0,00
		37.788.500,00	16.667.769.931,00	0,00	0,00
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	13.176.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.140.174.150,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.176.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.140.174.150,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	13.176.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.140.174.150,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	0,00	14.325.029.278,00	0,00	0,00
		0,00	13.242.420.120,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0,00	14.325.029.278,00	0,00	0,00
		0,00	13.242.420.120,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0,00	14.325.029.278,00	0,00	0,00
		0,00	13.242.420.120,00	0,00	0,00
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	710.856.786,00	106.738.317.867,00	0,00	0,00
		710.856.750,00	83.153.654.392,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	710.856.786,00	106.738.317.867,00	0,00	0,00
		710.856.750,00	83.153.654.392,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	0,00	97.319.471.914,00	0,00	0,00
		0,00	76.880.446.724,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	710.856.786,00	0,00	0,00	0,00
		710.856.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	0,00	9.418.845.953,00	0,00	0,00
		0,00	6.273.207.668,00	0,00	0,00
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	1.735.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.606.881,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.735.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.606.881,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.735.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.606.881,00	0,00	0,00	0,00
1.04	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1.111.178.494,00	38.821.506,00	0,00	0,00
		1.108.297.882,00	38.128.506,00	0,00	0,00
1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	492.138.194,00	38.821.506,00	0,00	0,00
		489.935.082,00	38.128.506,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.875.716,00	0,00	0,00	0,00
		29.621.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.049.717,00	0,00	0,00	0,00
		5.036.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.159.950,00	0,00	0,00	0,00
		5.145.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.064.100,00	0,00	0,00	0,00
		4.876.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.062.149,00	0,00	0,00	0,00
		5.043.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.016.700,00	0,00	0,00	0,00
		5.004.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.391.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.390.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.131.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.125.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.310.412,00	0,00	0,00	0,00
		79.293.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.840.206,00	0,00	0,00	0,00
		63.840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.897.706,00	0,00	0,00	0,00
		4.892.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.124.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.118.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.014.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.008.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.584.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.583.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.584.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.583.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.870.600,00	0,00	0,00	0,00
		11.870.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.870.600,00	0,00	0,00	0,00
		11.870.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.217.066,00	0,00	0,00	0,00
		303.731.422,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.934.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.748.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.748.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.442.646,00	0,00	0,00	0,00
		22.415.700,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.343.420,00	0,00	0,00	0,00
		14.148.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		263.484.322,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.690.000,00	38.821.506,00	0,00	0,00
		1.690.000,00	38.128.506,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.690.000,00	38.821.506,00	0,00	0,00
		1.690.000,00	38.128.506,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.724.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.570.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.154.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	609.050.300,00	0,00	0,00	0,00
		608.802.800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	599.060.300,00	0,00	0,00	0,00
		599.032.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	325.483.000,00	0,00	0,00	0,00
		325.483.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	9.577.300,00	0,00	0,00	0,00
		9.549.800,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	264.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		264.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	5.840.700.050,00	378.261.425,00	0,00	0,00
		5.764.434.327,00	338.790.000,00	0,00	0,00
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.742.962.575,00	378.261.425,00	0,00	0,00
		4.706.125.582,00	338.790.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.909.600,00	0,00	0,00	0,00
		52.874.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.211.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.204.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.509.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.503.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.321.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.318.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.509.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.503.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.321.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.318.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.036.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.027.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	277.620.875,00	0,00	0,00	0,00
		272.767.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252.220.675,00	0,00	0,00	0,00
		247.380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.187.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.186.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.213.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.201.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	438.495.700,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		421.971.100,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	267.312.700,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		266.695.600,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	171.183.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.275.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.693.474.300,00	162.261.425,00	0,00	0,00
		1.682.850.682,00	161.030.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.574.200,00	0,00	0,00	0,00
		9.574.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.455.700,00	162.261.425,00	0,00	0,00
		3.455.700,00	161.030.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	372.219.600,00	0,00	0,00	0,00
		372.194.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.102.800,00	0,00	0,00	0,00
		116.101.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.182.122.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.524.782,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	171.760.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	171.760.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.992.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.987.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.982.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.977.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.062.100,00	0,00	0,00	0,00
		288.062.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.470.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.758.100,00	0,00	0,00	0,00
		17.758.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.724.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	816.162.475,00	0,00	0,00	0,00
		794.173.745,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	645.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		627.326.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	196.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	256.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	93.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.725.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	98.721.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.916.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	130.111.475,00	0,00	0,00	0,00
		129.507.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.561.475,00	0,00	0,00	0,00
		34.497.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.755.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.339.945,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	40.755.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.339.945,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	166.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.440.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	51.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	88.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	76.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.320.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	26.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.570.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.570.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	115.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.695.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.695.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.545.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	<b>SOSIAL</b>	3.380.256.170,00	183.520.050,00	0,00	0,00
		3.346.228.903,00	183.390.250,00	0,00	0,00
1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	974.865.050,00	175.120.050,00	0,00	0,00
		973.998.911,00	174.990.250,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.604.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.604.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.989.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.989.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.452.600,00	0,00	0,00	0,00
		5.452.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.589.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.589.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.589.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.589.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.794.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.794.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.189.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.189.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.288.800,00	0,00	0,00	0,00
		75.288.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.480.800,00	0,00	0,00	0,00
		66.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.204.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.604.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.604.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.102.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.102.000,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.102.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.102.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.632.600,00	15.929.000,00	0,00	0,00
		386.522.211,00	15.929.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.769.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.769.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	15.929.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.929.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	727.400,00	0,00	0,00	0,00
		727.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.508.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.508.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.628.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.517.611,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.270.000,00	159.191.050,00	0,00	0,00
		35.590.000,00	159.061.250,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.890.000,00	131.780.000,00	0,00	0,00
		1.890.000,00	131.780.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	27.411.050,00	0,00	0,00
		0,00	27.281.250,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.608.800,00	0,00	0,00	0,00
		312.608.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.109.600,00	0,00	0,00	0,00
		85.109.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.499.200,00	0,00	0,00	0,00
		217.499.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.358.850,00	0,00	0,00	0,00
		115.284.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.824.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.784.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.534.850,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	418.776.020,00	0,00	0,00	0,00
		418.748.020,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	418.776.020,00	0,00	0,00	0,00
		418.748.020,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	313.776.020,00	0,00	0,00	0,00
		313.748.020,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	1.675.815.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
		1.652.821.872,00	8.400.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.567.815.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
		1.550.821.872,00	8.400.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.495.283.872,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	51.482.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.443.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	200.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		199.990.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		199.990.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	200.000.100,00	0,00	0,00	0,00
		199.990.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	110.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.670.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	95.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.670.000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	43.950.923.368,00	17.631.134.238,00	0,00	0,00
		40.416.911.063,00	16.744.134.917,00	0,00	0,00
2.07	<b>TENAGA KERJA</b>	1.711.686.751,00	8.236.200,00	0,00	0,00
		1.469.673.719,00	8.236.200,00	0,00	0,00
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.043.856.951,00	8.236.200,00	0,00	0,00
		863.502.519,00	8.236.200,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.960.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.788.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.781.700,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.746.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.012.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.640.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.731.351,00	0,00	0,00	0,00
		111.827.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.485.551,00	0,00	0,00	0,00
		10.138.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.565.800,00	0,00	0,00	0,00
		28.009.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.001.000,00	8.236.200,00	0,00	0,00
		4.796.000,00	8.236.200,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.001.000,00	8.236.200,00	0,00	0,00
		4.796.000,00	8.236.200,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.902.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.902.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.374.600,00	0,00	0,00	0,00
		462.563.541,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	319.426.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.032.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.009.600,00	0,00	0,00	0,00
		41.253.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.939.000,00	0,00	0,00	0,00
		273.277.941,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.423.678,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.423.678,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	667.829.800,00	0,00	0,00	0,00
		606.171.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	667.829.800,00	0,00	0,00	0,00
		606.171.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	667.829.800,00	0,00	0,00	0,00
		606.171.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	1.643.121.550,00	2.147.601.450,00	0,00	0,00
		1.543.061.852,00	2.135.977.186,00	0,00	0,00
2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.583.254.750,00	2.147.601.450,00	0,00	0,00
		1.483.355.052,00	2.135.977.186,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.515.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.515.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.455.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.545.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144.295.050,00	0,00	0,00	0,00
		144.290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	141.840.050,00	0,00	0,00	0,00
		141.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.260.100,00	126.806.950,00	0,00	0,00
		477.396.972,00	125.800.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	126.806.950,00	0,00	0,00
		0,00	125.800.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.066.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.066.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.236.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.236.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.996.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.996.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.186.000,00	0,00	0,00	0,00
		421.097.872,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.763.000,00	2.020.794.500,00	0,00	0,00
		137.756.680,00	2.010.177.186,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.763.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
		137.756.680,00	1.989.477.186,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.794.500,00	0,00	0,00
		0,00	20.700.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.956.600,00	0,00	0,00	0,00
		700.931.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.956.600,00	0,00	0,00	0,00
		696.931.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	17.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	13.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	13.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.578.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	7.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.036.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.036.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.036.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	32.267.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.267.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.267.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.267.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	32.267.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.267.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	<b>PANGAN</b>	2.308.695.100,00	82.537.680,00	0,00	0,00
		2.243.811.212,00	82.493.280,00	0,00	0,00
2.09.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.100.323.869,00	82.537.680,00	0,00	0,00
		1.055.613.586,00	82.493.280,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.140.175,00	0,00	0,00	0,00
		17.270.405,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.362.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.354.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.462.735,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.462.735,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.085.547,00	0,00	0,00	0,00
		76.021.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.201.442,00	0,00	0,00	0,00
		65.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.607.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.607.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.628.035,00	0,00	0,00	0,00
		3.607.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.696.006,00	0,00	0,00	0,00
		73.347.246,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73.696.006,00	0,00	0,00	0,00
		73.347.246,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	739.100.941,00	0,00	0,00	0,00
		705.308.841,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.108.655,00	0,00	0,00	0,00
		14.103.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.537.028,00	0,00	0,00	0,00
		43.705.572,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.265.458,00	0,00	0,00	0,00
		186.499.557,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.171.800,00	0,00	0,00	0,00
		38.982.512,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.268.000,00	0,00	0,00	0,00
		394.268.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	82.537.680,00	0,00	0,00
		0,00	82.493.280,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	82.537.680,00	0,00	0,00
		0,00	82.493.280,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.801.200,00	0,00	0,00	0,00
		69.165.494,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.946.200,00	0,00	0,00	0,00
		35.310.494,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	1.208.371.231,00	0,00	0,00	0,00
		1.188.197.626,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	682.141.133,00	0,00	0,00	0,00
		673.779.386,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	46.425.905,00	0,00	0,00	0,00
		46.291.765,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	587.669.200,00	0,00	0,00	0,00
		579.660.090,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	48.046.028,00	0,00	0,00	0,00
		47.827.531,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	526.230.098,00	0,00	0,00	0,00
		514.418.240,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	526.230.098,00	0,00	0,00	0,00
		514.418.240,00	0,00	0,00	0,00
2.11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	7.865.664.422,00	870.795.050,00	0,00	0,00
		7.760.997.115,00	867.330.438,00	0,00	0,00
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.771.759.336,00	668.095.050,00	0,00	0,00
		2.691.204.099,00	664.630.438,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.892.072,00	0,00	0,00	0,00
		9.022.075,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.997.913,00	0,00	0,00	0,00
		5.858.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.894.159,00	0,00	0,00	0,00
		3.163.575,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.233.563,00	0,00	0,00	0,00
		73.474.121,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.380.818,00	0,00	0,00	0,00
		67.180.621,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.852.745,00	0,00	0,00	0,00
		6.293.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.067.201,00	88.135.050,00	0,00	0,00
		516.654.142,00	84.670.438,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.981.455,00	0,00	0,00	0,00
		5.924.175,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	88.135.050,00	0,00	0,00
		0,00	84.670.438,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.798.623,00	0,00	0,00	0,00
		181.557.958,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.584.123,00	0,00	0,00	0,00
		53.581.450,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.703.000,00	0,00	0,00	0,00
		275.590.559,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.576.000,00	579.960.000,00	0,00	0,00
		57.612.153,00	579.960.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.576.000,00	579.960.000,00	0,00	0,00
		57.612.153,00	579.960.000,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.789.300.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.741.751.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.110.200,00	0,00	0,00	0,00
		23.096.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.757.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.709.935.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.690.300,00	0,00	0,00	0,00
		274.690.608,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.537.700,00	0,00	0,00	0,00
		38.732.250,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.152.600,00	0,00	0,00	0,00
		235.958.358,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	4.582.357.436,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		4.563.908.816,00	125.000.000,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.582.357.436,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		4.563.908.816,00	125.000.000,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	4.575.259.536,00	0,00	0,00	0,00
		4.556.810.916,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.097.900,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		7.097.900,00	125.000.000,00	0,00	0,00
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	511.547.650,00	77.700.000,00	0,00	0,00
		505.884.200,00	77.700.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	511.547.650,00	77.700.000,00	0,00	0,00
		505.884.200,00	77.700.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	511.547.650,00	77.700.000,00	0,00	0,00
		505.884.200,00	77.700.000,00	0,00	0,00
2.12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	1.710.350.300,00	512.669.700,00	0,00	0,00
		1.706.596.800,00	486.884.700,00	0,00	0,00
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.710.350.300,00	512.669.700,00	0,00	0,00
		1.706.596.800,00	486.884.700,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.559.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.559.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.698.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.698.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.761.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.761.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.402.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.698.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.698.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.259.700,00	0,00	0,00	0,00
		60.254.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.005.700,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.091.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.163.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.163.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.316.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.281.254.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.427.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.427.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.647.200,00	0,00	0,00	0,00
		308.090.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	295.531.600,00	0,00	0,00	0,00
		295.144.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		669.591.700,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.560.000,00	512.669.700,00	0,00	0,00
		7.560.000,00	486.884.700,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.560.000,00	512.669.700,00	0,00	0,00
		7.560.000,00	486.884.700,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.655.200,00	0,00	0,00	0,00
		160.369.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.925.200,00	0,00	0,00	0,00
		78.729.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	2.097.791.952,00	52.208.048,00	0,00	0,00
		1.969.242.580,00	54.994.100,00	0,00	0,00
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.019.552.846,00	31.724.630,00	0,00	0,00
		910.260.617,00	35.064.700,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.631.018,00	0,00	0,00	0,00
		18.631.018,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.177.374,00	0,00	0,00	0,00
		4.177.374,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.597.176,00	0,00	0,00	0,00
		4.597.176,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.088.685,00	0,00	0,00	0,00
		3.088.685,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.504.970,00	0,00	0,00	0,00
		3.504.970,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.262.813,00	0,00	0,00	0,00
		3.262.813,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.101.773,00	0,00	0,00	0,00
		105.970.263,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.749.330,00	0,00	0,00	0,00
		93.660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.182.399,00	0,00	0,00	0,00
		4.182.399,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.170.044,00	0,00	0,00	0,00
		8.127.864,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.646.887,00	0,00	0,00	0,00
		18.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.646.887,00	0,00	0,00	0,00
		18.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.176.768,00	31.724.630,00	0,00	0,00
		579.832.873,00	35.064.700,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.606.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.606.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	31.724.630,00	0,00	0,00
		0,00	35.064.700,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.559.068,00	0,00	0,00	0,00
		109.791.654,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.591.100,00	0,00	0,00	0,00
		30.491.100,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	538.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		436.943.519,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.496.400,00	0,00	0,00	0,00
		69.351.463,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.496.400,00	0,00	0,00	0,00
		69.351.463,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	111.314.382,00	0,00	0,00	0,00
		111.314.382,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	111.314.382,00	0,00	0,00	0,00
		111.314.382,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	111.314.382,00	0,00	0,00	0,00
		111.314.382,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	966.924.724,00	20.483.418,00	0,00	0,00
		947.667.581,00	19.929.400,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	966.924.724,00	20.483.418,00	0,00	0,00
		947.667.581,00	19.929.400,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	756.509.612,00	0,00	0,00	0,00
		756.162.232,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	210.415.112,00	20.483.418,00	0,00	0,00
		191.505.349,00	19.929.400,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	11.746.927.000,00	365.716.000,00	0,00	0,00
		11.140.588.800,00	354.584.000,00	0,00	0,00
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	1.007.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		980.344.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.007.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		980.344.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.007.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		980.344.800,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	4.256.687.000,00	365.716.000,00	0,00	0,00
		4.193.077.000,00	354.584.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.072.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.072.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.072.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.072.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	352.920.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	352.920.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.074.687.000,00	5.716.000,00	0,00	0,00
		1.014.587.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1.038.687.000,00	5.716.000,00	0,00	0,00
		983.087.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.106.490.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2.110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.106.490.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	6.482.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.967.167.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.482.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.967.167.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	6.482.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.967.167.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	<b>PERHUBUNGAN</b>	5.206.072.600,00	12.726.441.400,00	0,00	0,00
		4.244.467.536,00	11.894.542.390,00	0,00	0,00
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.877.182.600,00	12.499.563.400,00	0,00	0,00
		1.737.667.536,00	11.766.132.390,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.499.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.999.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.506.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	107.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.726.800,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.999.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.616.800,00	0,00	0,00	0,00
		88.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.616.800,00	0,00	0,00	0,00
		88.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.773.900,00	0,00	0,00	0,00
		437.562.093,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.997.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.365.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.252.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.108.100,00	0,00	0,00	0,00
		97.996.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.962.400,00	0,00	0,00	0,00
		28.123.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.627.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		287.564.393,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	835.191.900,00	12.499.563.400,00	0,00	0,00
		718.237.629,00	11.766.132.390,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	776.253.900,00	12.499.563.400,00	0,00	0,00
		718.237.629,00	11.766.132.390,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.938.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.672.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.872.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.959.314,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.990.814,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.968.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	86.210.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00
		83.840.000,00	128.410.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	86.210.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00
		83.840.000,00	128.410.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	86.210.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00
		83.840.000,00	128.410.000,00	0,00	0,00
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	3.242.680.000,00	96.078.000,00	0,00	0,00
		2.422.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.141.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.325.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.141.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.325.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	101.520.000,00	96.078.000,00	0,00	0,00
		97.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	101.520.000,00	96.078.000,00	0,00	0,00
		97.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16	<b>KOMUNIKASI &amp; INFORMATIKA</b>	3.238.908.700,00	436.415.300,00	0,00	0,00
		3.051.399.015,00	432.406.500,00	0,00	0,00
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.059.140.870,00	318.355.100,00	0,00	0,00
		1.045.186.280,00	314.606.500,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.998.700,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.999.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.999.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.600.370,00	0,00	0,00	0,00
		108.599.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.600.370,00	0,00	0,00	0,00
		96.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.999.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	676.608.500,00	264.710.900,00	0,00	0,00
		674.774.170,00	261.591.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.176.800,00	0,00	0,00	0,00
		35.145.970,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.447.700,00	264.710.900,00	0,00	0,00
		3.446.000,00	261.591.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.984.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.689.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.731.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		460.761.700,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	53.644.200,00	0,00	0,00
		680.000,00	53.015.500,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	680.000,00	33.644.200,00	0,00	0,00
		680.000,00	33.015.500,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		158.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.452.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.333.910,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.433.910,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	534.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.792.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	534.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.792.700,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.291.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.722.400,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	306.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		306.778.400,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	1.644.967.830,00	118.060.200,00	0,00	0,00
		1.473.420.035,00	117.800.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.551.834.030,00	0,00	0,00	0,00
		1.386.990.635,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.551.834.030,00	0,00	0,00	0,00
		1.386.990.635,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93.133.800,00	118.060.200,00	0,00	0,00
		86.429.400,00	117.800.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.064.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.841.250,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	13.133.800,00	118.060.200,00	0,00	0,00
		12.523.250,00	117.800.000,00	0,00	0,00
2.17	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	1.368.470.000,00	260.500.000,00	0,00	0,00
		1.319.407.614,00	260.026.123,00	0,00	0,00
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	216.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.980.164,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	216.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.980.164,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	216.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.980.164,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	241.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		241.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	241.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		241.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	241.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		241.030.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	910.700.000,00	260.500.000,00	0,00	0,00
		873.397.450,00	260.026.123,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	910.700.000,00	260.500.000,00	0,00	0,00
		873.397.450,00	260.026.123,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	910.700.000,00	260.500.000,00	0,00	0,00
		873.397.450,00	260.026.123,00	0,00	0,00
2.18	<b>PENANAMAN MODAL</b>	2.164.566.500,00	51.833.400,00	0,00	0,00
		2.125.757.509,00	51.520.000,00	0,00	0,00
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.047.588.900,00	51.833.400,00	0,00	0,00
		1.041.111.816,00	51.520.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.177.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.177.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.077.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.077.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.330.200,00	0,00	0,00	0,00
		85.370.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.920.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.550.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.550.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.828.600,00	0,00	0,00	0,00
		45.828.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.828.600,00	0,00	0,00	0,00
		45.828.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	666.783.100,00	0,00	0,00	0,00
		665.977.016,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.426.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.426.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.573.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.573.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.146.500,00	0,00	0,00	0,00
		115.146.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.929.200,00	0,00	0,00	0,00
		26.929.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		495.901.916,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	51.833.400,00	0,00	0,00
		680.000,00	51.520.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	51.833.400,00	0,00	0,00
		680.000,00	51.520.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.460.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.619.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.369.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	484.826.500,00	0,00	0,00	0,00
		452.964.593,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	484.826.500,00	0,00	0,00	0,00
		452.964.593,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	484.826.500,00	0,00	0,00	0,00
		452.964.593,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	50.051.100,00	0,00	0,00	0,00
		50.011.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.051.100,00	0,00	0,00	0,00
		50.011.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	21.008.300,00	0,00	0,00	0,00
		20.968.300,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	29.042.800,00	0,00	0,00	0,00
		29.042.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	532.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	532.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.896.400,00	0,00	0,00	0,00
		100.896.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	276.864.000,00	0,00	0,00	0,00
		276.864.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	154.339.600,00	0,00	0,00	0,00
		154.339.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	1.035.385.600,00	0,00	0,00	0,00
		35.385.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	961.677.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.677.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	961.677.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.677.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	961.677.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.677.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	73.708.600,00	0,00	0,00	0,00
		23.708.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	73.708.600,00	0,00	0,00	0,00
		23.708.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	73.708.600,00	0,00	0,00	0,00
		23.708.600,00	0,00	0,00	0,00
2.20	<b>STATISTIK</b>	42.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.797.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	42.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.797.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.797.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	42.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.797.300,00	0,00	0,00	0,00
2.21	<b>PERSANDIAN</b>	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.462.800,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.462.800,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.462.800,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.462.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22	<b>KEBUDAYAAN</b>	1.179.841.893,00	104.945.010,00	0,00	0,00
		1.140.511.211,00	103.925.000,00	0,00	0,00
2.22.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	888.688.893,00	104.627.010,00	0,00	0,00
		851.036.403,00	103.925.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.098.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.098.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.488.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.610.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.494.893,00	0,00	0,00	0,00
		147.494.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135.380.493,00	0,00	0,00	0,00
		135.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.668.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.668.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.446.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.446.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.926.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.521.487,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.926.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.521.487,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.020.000,00	98.627.010,00	0,00	0,00
		448.802.626,00	97.925.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.306.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.303.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	98.627.010,00	0,00	0,00
		0,00	97.925.000,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.775.600,00	0,00	0,00	0,00
		147.621.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.069.600,00	0,00	0,00	0,00
		9.397.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.868.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.480.326,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.219.890,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.244.890,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	154.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.600.200,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.600.200,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	154.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.600.200,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	136.423.000,00	318.000,00	0,00	0,00
		135.874.608,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	136.423.000,00	318.000,00	0,00	0,00
		135.874.608,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	136.423.000,00	318.000,00	0,00	0,00
		135.874.608,00	0,00	0,00	0,00
2.23	<b>PERPUSTAKAAN</b>	588.765.000,00	11.235.000,00	0,00	0,00
		585.750.400,00	11.215.000,00	0,00	0,00
2.23.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	445.746.200,00	11.235.000,00	0,00	0,00
		443.248.200,00	11.215.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.317.700,00	11.235.000,00	0,00	0,00
		192.819.700,00	11.215.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	11.235.000,00	0,00	0,00
		0,00	11.215.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.924.700,00	0,00	0,00	0,00
		49.426.700,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.265.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.078.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.078.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.008.500,00	0,00	0,00	0,00
		89.008.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.008.500,00	0,00	0,00	0,00
		86.008.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	143.018.800,00	0,00	0,00	0,00
		142.502.200,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.039.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.039.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.039.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.039.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.979.800,00	0,00	0,00	0,00
		63.463.200,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	63.979.800,00	0,00	0,00	0,00
		63.463.200,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	31.809.822.979,00	1.029.134.778,00	0,00	0,00
		30.899.796.814,00	971.433.941,00	0,00	0,00
3.25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	4.878.859.928,00	109.727.128,00	0,00	0,00
		4.714.896.000,00	107.692.175,00	0,00	0,00
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	623.961.528,00	109.727.128,00	0,00	0,00
		607.295.310,00	107.692.175,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.546.341,00	0,00	0,00	0,00
		2.546.269,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.377.843,00	0,00	0,00	0,00
		1.377.771,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.168.498,00	0,00	0,00	0,00
		1.168.498,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.046.128,00	0,00	0,00	0,00
		86.732.738,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.797.420,00	0,00	0,00	0,00
		84.484.030,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.268.508,00	0,00	0,00	0,00
		1.268.508,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	980.200,00	0,00	0,00	0,00
		980.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.247.376,00	0,00	0,00	0,00
		40.499.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.247.376,00	0,00	0,00	0,00
		22.999.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.009.583,00	41.487.128,00	0,00	0,00
		312.645.003,00	39.452.175,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.656.120,00	0,00	0,00	0,00
		1.656.120,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	41.487.128,00	0,00	0,00
		0,00	39.452.175,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.993.055,00	0,00	0,00	0,00
		62.647.994,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.323.408,00	0,00	0,00	0,00
		38.320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.037.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.020.889,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	68.240.000,00	0,00	0,00
		0,00	68.240.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	68.240.000,00	0,00	0,00
		0,00	68.240.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.912.100,00	0,00	0,00	0,00
		60.672.100,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.692.100,00	0,00	0,00	0,00
		44.692.100,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.020.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.960.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	2.879.430.273,00	0,00	0,00	0,00
		2.827.258.478,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.879.430.273,00	0,00	0,00	0,00
		2.827.258.478,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	85.414.540,00	0,00	0,00	0,00
		59.283.106,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.794.015.733,00	0,00	0,00	0,00
		2.767.975.372,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	1.319.870.204,00	0,00	0,00	0,00
		1.225.532.089,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	70.757.146,00	0,00	0,00	0,00
		70.331.396,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	70.757.146,00	0,00	0,00	0,00
		70.331.396,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.249.113.058,00	0,00	0,00	0,00
		1.155.200.693,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	978.875.908,00	0,00	0,00	0,00
		907.960.168,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.237.150,00	0,00	0,00	0,00
		247.240.525,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	55.597.923,00	0,00	0,00	0,00
		54.810.123,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	55.597.923,00	0,00	0,00	0,00
		54.810.123,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.597.923,00	0,00	0,00	0,00
		54.810.123,00	0,00	0,00	0,00
3.26	<b>PARIWISATA</b>	6.958.971.235,00	204.519.200,00	0,00	0,00
		6.625.571.921,00	204.384.310,00	0,00	0,00
3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	683.425.500,00	186.459.000,00	0,00	0,00
		454.732.576,00	186.334.310,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	683.425.500,00	186.459.000,00	0,00	0,00
		454.732.576,00	186.334.310,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	227.585.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	183.524.100,00	186.459.000,00	0,00	0,00
		182.944.096,00	186.334.310,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	272.316.000,00	0,00	0,00	0,00
		271.788.480,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	5.559.555.735,00	18.060.200,00	0,00	0,00
		5.459.040.616,00	18.050.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.559.555.735,00	18.060.200,00	0,00	0,00
		5.459.040.616,00	18.050.000,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	5.505.055.735,00	18.060.200,00	0,00	0,00
		5.415.040.616,00	18.050.000,00	0,00	0,00
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	715.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		711.798.729,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	715.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		711.798.729,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	715.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		711.798.729,00	0,00	0,00	0,00
3.27	<b>PERTANIAN</b>	18.757.903.206,00	237.527.060,00	0,00	0,00
		18.739.910.013,00	221.070.000,00	0,00	0,00
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.458.460.512,00	237.527.060,00	0,00	0,00
		1.455.731.113,00	221.070.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.943.800,00	0,00	0,00	0,00
		34.943.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.512.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.512.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.216.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.216.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.468.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.468.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.927.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.927.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.819.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.819.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.276.757,00	0,00	0,00	0,00
		166.947.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.409.557,00	0,00	0,00	0,00
		154.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.089.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.089.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.778.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.778.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.887.378,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.887.378,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.003.286.955,00	237.527.060,00	0,00	0,00
		1.002.348.855,00	221.070.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.529.955,00	237.527.060,00	0,00	0,00
		8.529.955,00	221.070.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.593.300,00	0,00	0,00	0,00
		221.655.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.193.700,00	0,00	0,00	0,00
		63.193.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		708.970.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.207.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.201.740,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.207.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.201.740,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.402.140,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.912.140,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.490.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	6.953.764.052,00	0,00	0,00	0,00
		6.867.954.807,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.562.150.543,00	0,00	0,00	0,00
		4.479.688.732,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.562.150.543,00	0,00	0,00	0,00
		4.479.688.732,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.391.613.509,00	0,00	0,00	0,00
		2.388.266.075,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.391.613.509,00	0,00	0,00	0,00
		2.388.266.075,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	10.115.678.642,00	0,00	0,00	0,00
		10.094.403.666,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	10.115.678.642,00	0,00	0,00	0,00
		10.094.403.666,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	143.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.170.327,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.464.614.890,00	0,00	0,00	0,00
		8.459.204.917,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.507.693.752,00	0,00	0,00	0,00
		1.492.028.422,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.338.337,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.338.337,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.338.337,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.482.090,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.482.090,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.482.090,00	0,00	0,00	0,00
3.30	<b>PERDAGANGAN</b>	621.899.600,00	415.000.000,00	0,00	0,00
		232.045.780,00	414.342.476,00	0,00	0,00
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	70.975.800,00	415.000.000,00	0,00	0,00
		70.852.040,00	414.342.476,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	70.975.800,00	415.000.000,00	0,00	0,00
		70.852.040,00	414.342.476,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.025.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.909.540,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	57.950.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00
		57.942.500,00	414.342.476,00	0,00	0,00
3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	550.923.800,00	0,00	0,00	0,00
		161.193.740,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	518.659.900,00	0,00	0,00	0,00
		129.164.560,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.209.900,00	0,00	0,00	0,00
		37.106.820,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	481.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.057.740,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.263.900,00	0,00	0,00	0,00
		32.029.180,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	32.263.900,00	0,00	0,00	0,00
		32.029.180,00	0,00	0,00	0,00
3.31	<b>PERINDUSTRIAN</b>	592.189.010,00	62.361.390,00	0,00	0,00
		587.373.100,00	23.944.980,00	0,00	0,00
3.31.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	550.704.910,00	23.944.980,00	0,00	0,00
		546.314.780,00	23.944.980,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.921.200,00	0,00	0,00	0,00
		23.914.505,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.502.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.501.045,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.897.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.896.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.939.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.938.630,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.141.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.140.645,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.440.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.439.130,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.998.555,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.840.210,00	0,00	0,00	0,00
		73.836.880,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.840.210,00	0,00	0,00	0,00
		63.840.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.998.690,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.998.190,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.049.200,00	0,00	0,00	0,00
		21.903.875,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.049.200,00	0,00	0,00	0,00
		21.903.875,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.536.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.536.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.536.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.536.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.538.300,00	0,00	0,00	0,00
		261.729.395,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.981.200,00	0,00	0,00	0,00
		104.919.420,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.851.100,00	0,00	0,00	0,00
		9.125.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.706.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.684.475,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	23.944.980,00	0,00	0,00
		0,00	23.944.980,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	18.094.380,00	0,00	0,00
		0,00	18.094.380,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	5.850.600,00	0,00	0,00
		0,00	5.850.600,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.394.125,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.146.725,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.247.400,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	41.484.100,00	38.416.410,00	0,00	0,00
		41.058.320,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	41.484.100,00	38.416.410,00	0,00	0,00
		41.058.320,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	21.358.900,00	0,00	0,00	0,00
		21.282.120,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.497.100,00	38.416.410,00	0,00	0,00
		2.157.100,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	17.628.100,00	0,00	0,00	0,00
		17.619.100,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	95.773.260.598,00	3.179.103.709,00	0,00	0,00
		87.813.383.529,00	2.899.111.079,00	0,00	0,00
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	52.870.546.845,00	2.981.154.389,00	0,00	0,00
		45.127.911.659,00	2.702.761.079,00	0,00	0,00
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	25.192.591.512,00	2.911.830.726,00	0,00	0,00
		22.847.920.310,00	2.633.761.079,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.300.822,00	0,00	0,00	0,00
		66.612.098,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.248.568,00	0,00	0,00	0,00
		21.613.568,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.553.129,00	0,00	0,00	0,00
		7.499.405,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.499.911,00	0,00	0,00	0,00
		7.499.911,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.179,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.179,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.497.495,00	0,00	0,00	0,00
		7.497.495,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.503.441,00	0,00	0,00	0,00
		7.503.441,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.498.099,00	0,00	0,00	0,00
		7.498.099,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.615.287.449,00	0,00	0,00	0,00
		1.290.182.240,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.600.289.135,00	0,00	0,00	0,00
		1.275.230.126,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.499.513,00	0,00	0,00	0,00
		7.499.513,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.498.801,00	0,00	0,00	0,00
		7.452.601,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	356.772.459,00	86.580.000,00	0,00	0,00
		353.191.162,00	62.301.079,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	267.281.517,00	86.580.000,00	0,00	0,00
		264.919.862,00	62.301.079,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.490.942,00	0,00	0,00	0,00
		88.271.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.188.650,00	0,00	0,00	0,00
		352.826.820,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	383.188.650,00	0,00	0,00	0,00
		352.826.820,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.493.010.319,00	1.658.795.726,00	0,00	0,00
		11.077.329.599,00	1.432.655.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	216.398.496,00	0,00	0,00	0,00
		141.785.046,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.509.504,00	1.410.574.348,00	0,00	0,00
		154.931.699,00	1.245.325.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	149.027.560,00	248.221.378,00	0,00	0,00
		126.755.140,00	187.330.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.987.193.059,00	0,00	0,00	0,00
		2.072.708.053,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	956.357.700,00	0,00	0,00	0,00
		893.376.670,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.156.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		640.003.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.818.574.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.047.769.991,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.490.000,00	1.114.650.000,00	0,00	0,00
		2.290.000,00	1.087.000.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.490.000,00	1.114.650.000,00	0,00	0,00
		2.290.000,00	1.087.000.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.036.390.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.548.227.806,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.262.806,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.550.200,00	0,00	0,00	0,00
		200.765.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.567.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.205.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.693.950.100,00	7.960.000,00	0,00	0,00
		3.639.929.186,00	7.960.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.125.300.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.075.619.050,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.568.650.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00
		1.564.310.136,00	7.960.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.440.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.440.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	699.375.237,00	0,00	0,00	0,00
		687.096.907,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	174.662.550,00	0,00	0,00	0,00
		171.885.187,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99.898.034,00	0,00	0,00	0,00
		99.203.249,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	108.103.721,00	0,00	0,00	0,00
		107.392.612,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	139.965.191,00	0,00	0,00	0,00
		135.378.532,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	176.745.741,00	0,00	0,00	0,00
		173.237.327,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	502.826.276,00	43.845.000,00	0,00	0,00
		490.234.492,00	43.845.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	182.616.143,00	0,00	0,00	0,00
		180.983.403,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	139.474.344,00	0,00	0,00	0,00
		133.747.957,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	180.735.789,00	43.845.000,00	0,00	0,00
		175.503.132,00	43.845.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	24.927.092.739,00	27.365.663,00	0,00	0,00
		19.577.973.451,00	27.200.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	575.442.304,00	0,00	0,00	0,00
		540.311.044,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	360.385.420,00	0,00	0,00	0,00
		337.086.419,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	109.981.959,00	0,00	0,00	0,00
		106.032.893,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	105.074.925,00	0,00	0,00	0,00
		97.191.732,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	23.465.960.416,00	0,00	0,00	0,00
		18.241.390.540,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	140.084.121,00	0,00	0,00	0,00
		128.195.121,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.880.892.940,00	0,00	0,00	0,00
		6.443.510.169,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	16.444.983.355,00	0,00	0,00	0,00
		11.669.685.250,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	476.219.827,00	27.365.663,00	0,00	0,00
		469.820.016,00	27.200.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	102.223.396,00	0,00	0,00	0,00
		96.390.140,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	316.947.790,00	27.365.663,00	0,00	0,00
		316.415.481,00	27.200.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	57.048.641,00	0,00	0,00	0,00
		57.014.395,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	409.470.192,00	0,00	0,00	0,00
		326.451.851,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	137.059.208,00	0,00	0,00	0,00
		84.255.731,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	99.982.333,00	0,00	0,00	0,00
		82.040.397,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	172.428.651,00	0,00	0,00	0,00
		160.155.723,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	2.750.862.594,00	41.958.000,00	0,00	0,00
		2.702.017.898,00	41.800.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	361.233.652,00	0,00	0,00	0,00
		346.625.057,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	19.722.646,00	0,00	0,00	0,00
		5.404.422,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	198.492.958,00	0,00	0,00	0,00
		198.411.408,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	143.018.048,00	0,00	0,00	0,00
		142.809.227,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	448.749.676,00	0,00	0,00	0,00
		445.764.022,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	119.620.440,00	0,00	0,00	0,00
		118.867.991,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	164.362.331,00	0,00	0,00	0,00
		162.742.231,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	164.766.905,00	0,00	0,00	0,00
		164.153.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.569.097.212,00	41.958.000,00	0,00	0,00
		1.542.598.327,00	41.800.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.272.369.212,00	0,00	0,00	0,00
		1.259.663.743,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0,00	41.958.000,00	0,00	0,00
		0,00	41.800.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	296.728.000,00	0,00	0,00	0,00
		282.934.584,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	371.782.054,00	0,00	0,00	0,00
		367.030.492,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	67.135.524,00	0,00	0,00	0,00
		66.987.524,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	148.845.418,00	0,00	0,00	0,00
		145.250.818,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	155.801.112,00	0,00	0,00	0,00
		154.792.150,00	0,00	0,00	0,00
4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	42.902.713.753,00	197.949.320,00	0,00	0,00
		42.685.471.870,00	196.350.000,00	0,00	0,00
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	30.799.466.153,00	197.949.320,00	0,00	0,00
		30.698.884.640,00	196.350.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.907.200,00	0,00	0,00	0,00
		180.872.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.283.600,00	0,00	0,00	0,00
		29.273.300,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.557.200,00	0,00	0,00	0,00
		31.535.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.753.600,00	0,00	0,00	0,00
		28.752.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.779.200,00	0,00	0,00	0,00
		21.779.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.039.200,00	0,00	0,00	0,00
		23.038.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.626.800,00	0,00	0,00	0,00
		20.626.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.867.600,00	0,00	0,00	0,00
		25.867.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	309.399.793,00	0,00	0,00	0,00
		299.581.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	199.230.293,00	0,00	0,00	0,00
		189.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.312.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.237.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.233.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.436.100,00	0,00	0,00	0,00
		36.435.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.115.600,00	0,00	0,00	0,00
		85.638.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.019.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	27.985.600,00	0,00	0,00	0,00
		27.918.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.408.074.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.444.566.981,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	92.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.468.000,00	0,00	0,00	0,00
		205.922.441,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.107.341.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.176.894.540,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.044.714.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.041.114.977,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.011.400,00	0,00	0,00	0,00
		58.160.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.130.437.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.129.353.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	413.796.300,00	0,00	0,00	0,00
		413.174.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		440.425.977,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.040.000,00	197.949.320,00	0,00	0,00
		0,00	196.350.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.040.000,00	197.949.320,00	0,00	0,00
		0,00	196.350.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.511.000,00	0,00	0,00	0,00
		924.412.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.301.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.179.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		862.233.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		356.634.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	331.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		312.932.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.702.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.992.399.360,00	0,00	0,00	0,00
		16.897.464.584,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.992.399.360,00	0,00	0,00	0,00
		16.897.464.584,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.473.193.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.599.898,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.473.193.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.599.898,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	12.103.247.600,00	0,00	0,00	0,00
		11.986.587.230,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	64.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.292.400,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	25.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.917.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	39.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.374.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	98.539.400,00	0,00	0,00	0,00
		98.382.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.181.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30.396.100,00	0,00	0,00	0,00
		30.369.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	5.626.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.580.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	51.826.800,00	0,00	0,00	0,00
		51.824.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.427.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	313.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	313.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		311.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.263.584.700,00	0,00	0,00	0,00
		7.151.835.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.192.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.192.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	46.094.900,00	0,00	0,00	0,00
		45.963.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.025.089.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.913.471.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	29.697.500,00	0,00	0,00	0,00
		29.692.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	29.697.500,00	0,00	0,00	0,00
		29.692.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.332.836.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.331.134.730,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.996.582.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.996.319.673,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	29.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.693.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.306.274.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.122.057,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	213.725.274.971,00	800.331.982,00	9.558.656.879,00	457.754.119.920,00
		180.408.283.205,00	787.434.566,00	0,00	464.439.321.367,00
5.01	<b>PERENCANAAN</b>	3.408.729.500,00	266.078.396,00	0,00	0,00
		3.386.546.831,00	253.595.200,00	0,00	0,00
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.529.164.600,00	266.078.396,00	0,00	0,00
		2.516.068.031,00	253.595.200,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.490.900,00	0,00	0,00	0,00
		52.490.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.519.300,00	0,00	0,00	0,00
		7.519.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.487.100,00	0,00	0,00	0,00
		7.487.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.549.700,00	0,00	0,00	0,00
		7.549.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.475.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.475.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.502.800,00	0,00	0,00	0,00
		7.502.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.464.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.464.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.492.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.492.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.893.800,00	0,00	0,00	0,00
		181.893.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	151.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.485.700,00	0,00	0,00	0,00
		7.485.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.499.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.499.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.492.700,00	0,00	0,00	0,00
		7.492.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.496.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.061.600,00	0,00	0,00	0,00
		10.036.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.061.600,00	0,00	0,00	0,00
		10.036.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.733.475,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.733.475,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.663.599.700,00	246.078.396,00	0,00	0,00
		1.663.230.260,00	234.885.200,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.878.800,00	0,00	0,00	0,00
		39.877.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.942.800,00	246.078.396,00	0,00	0,00
		14.932.400,00	234.885.200,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.346.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.339.991,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.044.100,00	0,00	0,00	0,00
		74.793.804,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.994.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.297.388.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.297.293.065,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.344.200,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		3.344.200,00	18.710.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.344.200,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		3.344.200,00	18.710.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.808.035,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.041.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.766.435,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.174.400,00	0,00	0,00	0,00
		320.530.561,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.410.161,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.904.400,00	0,00	0,00	0,00
		199.375.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.745.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	397.082.400,00	0,00	0,00	0,00
		388.821.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	272.137.200,00	0,00	0,00	0,00
		263.887.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	10.471.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.471.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	18.740.800,00	0,00	0,00	0,00
		18.740.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	32.110.400,00	0,00	0,00	0,00
		32.110.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22.206.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.206.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	32.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.625.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19.964.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.964.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	136.019.800,00	0,00	0,00	0,00
		127.769.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.465.200,00	0,00	0,00	0,00
		65.464.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.704.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.704.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25.667.200,00	0,00	0,00	0,00
		25.666.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	31.093.800,00	0,00	0,00	0,00
		31.093.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	59.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.470.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	28.030.400,00	0,00	0,00	0,00
		28.020.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.449.600,00	0,00	0,00	0,00
		31.449.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	482.482.500,00	0,00	0,00	0,00
		481.657.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	207.088.500,00	0,00	0,00	0,00
		206.388.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.294.200,00	0,00	0,00	0,00
		17.294.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.999.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.008.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.008.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.644.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.644.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.667.900,00	0,00	0,00	0,00
		108.967.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.149.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.149.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.256.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.256.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.068.200,00	0,00	0,00	0,00
		14.068.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.625.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.584.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.584.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.649.300,00	0,00	0,00	0,00
		19.649.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.834.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.834.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	15.304.800,00	0,00	0,00	0,00
		15.304.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.993.600,00	0,00	0,00	0,00
		11.993.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.488.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.488.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.087.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.087.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31.683.400,00	0,00	0,00	0,00
		31.683.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	137.769.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.644.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.437.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.405.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.383.100,00	0,00	0,00	0,00
		17.378.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.758.700,00	0,00	0,00	0,00
		10.717.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	39.515.600,00	0,00	0,00	0,00
		39.500.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.919.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.903.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.150.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.150.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.076.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.068.700,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	19.527.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.520.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02	<b>KEUANGAN</b>	207.551.992.453,00	463.614.500,00	9.558.656.879,00	457.754.119.920,00
		174.376.254.202,00	463.200.280,00	0,00	464.439.321.367,00
5.02.00	<b>Non Program</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	200.735.367.725,00	431.614.500,00	0,00	0,00
		167.425.035.362,00	431.232.780,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.105.400,00	0,00	0,00	0,00
		46.969.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.485.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.479.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.485.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.473.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.693.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.685.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.079.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.061.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.887.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.877.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.387.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.371.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.087.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.021.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	191.903.994.925,00	0,00	0,00	0,00
		159.385.206.512,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	191.877.970.725,00	0,00	0,00	0,00
		159.359.270.312,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.424.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.414.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.824.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.776.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.949.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.933.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.824.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.810.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.268.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.902.698,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.976.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.228.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.926.698,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.189.489.400,00	431.614.500,00	0,00	0,00
		3.187.092.918,00	431.232.780,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.694.400,00	0,00	0,00	0,00
		43.639.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.450.000,00	431.614.500,00	0,00	0,00
		98.612.000,00	431.232.780,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	728.938.200,00	0,00	0,00	0,00
		728.273.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	472.196.800,00	0,00	0,00	0,00
		458.743.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	424.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		423.741.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.434.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.083.218,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.669.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.992.517.417,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.833.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.157.867.417,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	783.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		781.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		626.346.417,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		331.865.417,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	294.846.000,00	0,00	0,00	0,00
		294.481.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	4.374.036.400,00	32.000.000,00	9.558.656.879,00	457.754.119.920,00
		4.291.102.238,00	31.967.500,00	0,00	464.439.321.367,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.440.400.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.396.648.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	63.567.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.222.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.735.300,00	0,00	0,00	0,00
		60.529.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	20.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.826.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	37.546.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.022.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	20.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.610.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	20.426.400,00	0,00	0,00	0,00
		20.323.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	405.432.800,00	0,00	0,00	0,00
		390.993.693,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	425.898.800,00	0,00	0,00	0,00
		418.436.513,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	385.142.400,00	0,00	0,00	0,00
		364.685.094,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.421.297.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.387.928.326,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	241.428.600,00	0,00	0,00	0,00
		236.552.789,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.801.600,00	0,00	0,00	0,00
		21.301.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	18.155.500,00	0,00	0,00	0,00
		17.861.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	318.191.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.211.158,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	177.991.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.810.753,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	225.482.600,00	0,00	0,00	0,00
		221.866.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	261.996.700,00	0,00	0,00	0,00
		261.522.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	96.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.837.626,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.297.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	33.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.136.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	19.746.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.531.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.113.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.109.074.962,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	71.774.200,00	0,00	0,00	0,00
		71.627.472,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108.697.800,00	0,00	0,00	0,00
		107.111.238,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	285.577.600,00	0,00	0,00	0,00
		285.198.386,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	347.944.400,00	0,00	0,00	0,00
		346.749.426,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	299.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.388.440,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	240.580.700,00	0,00	9.558.656.879,00	457.754.119.920,00
		240.135.000,00	0,00	0,00	464.439.321.367,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	240.580.700,00	0,00	0,00	456.766.863.855,00
		240.135.000,00	0,00	0,00	464.439.321.367,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	9.558.656.879,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	987.256.065,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	158.514.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		157.315.150,00	31.967.500,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	116.314.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
		115.997.750,00	31.967.500,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	42.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.317.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	1.357.173.828,00	0,00	0,00	0,00
		1.324.121.483,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.357.173.828,00	0,00	0,00	0,00
		1.324.121.483,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	132.409.758,00	0,00	0,00	0,00
		131.238.575,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	298.908.230,00	0,00	0,00	0,00
		298.055.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	68.502.475,00	0,00	0,00	0,00
		63.764.320,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	586.005.350,00	0,00	0,00	0,00
		564.974.168,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	149.622.450,00	0,00	0,00	0,00
		145.179.604,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	121.725.565,00	0,00	0,00	0,00
		120.909.616,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	1.085.414.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.335.995.119,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.085.414.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.335.995.119,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	283.838.800,00	0,00	0,00	0,00
		566.214.465,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.448.500,00	0,00	0,00	0,00
		74.020.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	51.553.300,00	0,00	0,00	0,00
		51.391.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	63.018.400,00	0,00	0,00	0,00
		62.733.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4.410.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.410.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.781.100,00	0,00	0,00	0,00
		24.779.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	33.256.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.083.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	200.121.800,00	0,00	0,00	0,00
		198.333.631,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	18.739.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.648.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	113.157.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.842.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.393.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.393.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	207.696.600,00	0,00	0,00	0,00
		180.144.623,00	0,00	0,00	0,00
5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>	2.639.360.914,00	70.639.086,00	0,00	0,00
		2.520.366.572,00	70.639.086,00	0,00	0,00
5.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.410.678.301,00	70.639.086,00	0,00	0,00
		1.356.217.532,00	70.639.086,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.227.762,00	0,00	0,00	0,00
		9.167.701,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.126.981,00	0,00	0,00	0,00
		3.108.901,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.006.880,00	0,00	0,00	0,00
		1.988.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.053.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.035.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.053.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.035.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	986.901,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.002.035,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.005.699,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	996.336,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		218.858.770,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.066.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.066.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.792.770,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.278.504,00	70.639.086,00	0,00	0,00
		825.142.436,00	70.639.086,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.059.493,00	0,00	0,00	0,00
		3.059.493,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	67.561.500,00	0,00	0,00
		0,00	67.561.500,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.963.242,00	3.077.586,00	0,00	0,00
		12.943.052,00	3.077.586,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.555.909,00	0,00	0,00	0,00
		312.525.391,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.515.860,00	0,00	0,00	0,00
		43.515.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.748.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.436.000,00	0,00	0,00	0,00
		423.351.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.548.625,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.548.625,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	1.228.682.613,00	0,00	0,00	0,00
		1.164.149.040,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	322.174.503,00	0,00	0,00	0,00
		281.135.080,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	247.640.503,00	0,00	0,00	0,00
		245.163.731,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	36.084.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.971.349,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	38.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	36.084.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.703.674,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	36.084.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.703.674,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	834.324.110,00	0,00	0,00	0,00
		811.395.286,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	296.199.110,00	0,00	0,00	0,00
		296.184.310,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	237.347.000,00	0,00	0,00	0,00
		214.540.395,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	300.778.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.670.581,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.915.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.915.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	125.192.104,00	0,00	0,00	0,00
		125.115.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	125.192.104,00	0,00	0,00	0,00
		125.115.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	28.935.832,00	0,00	0,00	0,00
		28.913.300,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	28.935.832,00	0,00	0,00	0,00
		28.913.300,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	96.256.272,00	0,00	0,00	0,00
		96.202.300,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	56.269.200,00	0,00	0,00	0,00
		56.245.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	39.987.072,00	0,00	0,00	0,00
		39.956.700,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	7.208.553.275,00	471.702.900,00	0,00	0,00
		6.563.407.821,00	450.710.900,00	0,00	0,00
6.01	<b>INSPEKTORAT</b>	7.208.553.275,00	471.702.900,00	0,00	0,00
		6.563.407.821,00	450.710.900,00	0,00	0,00
6.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.847.172.175,00	471.702.900,00	0,00	0,00
		4.331.186.492,00	450.710.900,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.006.400,00	0,00	0,00	0,00
		28.465.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.998.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.998.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.987.100,00	0,00	0,00	0,00
		4.987.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.998.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.998.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.996.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.996.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.464.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.386.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.386.200,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.641.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.634.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.601.249.875,00	0,00	0,00	0,00
		2.123.609.274,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.583.764.275,00	0,00	0,00	0,00
		2.113.609.874,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.486.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.999.400,00	0,00	0,00	0,00
		9.999.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.515.200,00	0,00	0,00	0,00
		222.870.750,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	233.515.200,00	0,00	0,00	0,00
		222.870.750,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.646.894.700,00	131.882.900,00	0,00	0,00
		1.640.367.136,00	131.882.900,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.025.700,00	0,00	0,00	0,00
		12.025.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	131.882.900,00	0,00	0,00
		0,00	131.882.900,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.872.700,00	0,00	0,00	0,00
		20.614.050,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	344.468.900,00	0,00	0,00	0,00
		343.933.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	188.602.400,00	0,00	0,00	0,00
		187.014.250,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.080.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.076.779.536,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	135.350.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	135.350.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.660.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.576.000,00	183.820.000,00	0,00	0,00
		183.213.632,00	183.478.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.065.982,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.236.000,00	183.820.000,00	0,00	0,00
		105.147.650,00	183.478.000,00	0,00	0,00
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	2.054.751.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.048.379,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.480.423.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.408.241.654,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	175.634.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.784.804,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	281.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.670.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	634.288.000,00	0,00	0,00	0,00
		634.228.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	76.891.800,00	0,00	0,00	0,00
		75.658.850,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	312.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	574.328.000,00	0,00	0,00	0,00
		572.806.725,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	574.328.000,00	0,00	0,00	0,00
		572.806.725,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	306.629.300,00	0,00	0,00	0,00
		251.172.950,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	36.672.100,00	0,00	0,00	0,00
		21.051.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	31.682.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.061.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4.990.100,00	0,00	0,00	0,00
		4.990.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	269.957.200,00	0,00	0,00	0,00
		230.121.350,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11.230.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.230.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46.244.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.314.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	212.482.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.576.650,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	15.690.383.790,00	1.124.616.210,00	0,00	0,00
		15.610.448.536,00	1.054.591.003,00	0,00	0,00
7.01	<b>KECAMATAN</b>	15.690.383.790,00	1.124.616.210,00	0,00	0,00
		15.610.448.536,00	1.054.591.003,00	0,00	0,00
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	13.393.374.160,00	1.065.978.832,00	0,00	0,00
		13.321.885.758,00	995.953.625,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.106.185,00	0,00	0,00	0,00
		454.734.970,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.899.052,00	0,00	0,00	0,00
		76.758.668,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	103.189.616,00	0,00	0,00	0,00
		114.676.889,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	53.430.430,00	0,00	0,00	0,00
		53.305.828,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	80.283.576,00	0,00	0,00	0,00
		84.151.358,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.037.905,00	0,00	0,00	0,00
		50.008.605,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.957.352,00	0,00	0,00	0,00
		27.598.898,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.308.254,00	0,00	0,00	0,00
		48.234.724,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.839.717.036,00	0,00	0,00	0,00
		1.834.359.564,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.572.850.848,00	0,00	0,00	0,00
		1.541.768.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	143.977.131,00	0,00	0,00	0,00
		153.509.145,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	119.889.057,00	0,00	0,00	0,00
		136.082.969,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.999.450,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.824.150,00	0,00	0,00	0,00
		25.774.150,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.174.150,00	0,00	0,00	0,00
		9.124.150,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.650.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.659.245,00	19.377.100,00	0,00	0,00
		330.330.416,00	18.835.600,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.311.342,00	19.377.100,00	0,00	0,00
		13.311.342,00	18.835.600,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	301.997.903,00	0,00	0,00	0,00
		295.049.074,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.970.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.610.636.056,00	581.580.329,00	0,00	0,00
		8.565.564.232,00	574.726.239,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.133.764,00	0,00	0,00	0,00
		82.523.558,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.221.631,00	564.683.671,00	0,00	0,00
		61.007.791,00	557.830.239,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.365.130,00	4.573.000,00	0,00	0,00
		6.363.500,00	4.573.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.162.002.036,00	4.448.658,00	0,00	0,00
		3.150.730.211,00	4.448.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	472.666.495,00	7.875.000,00	0,00	0,00
		471.850.998,00	7.875.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	98.003.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.002.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.724.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.695.086.174,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	428.094.256,00	0,00	0,00
		0,00	365.468.786,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	88.620.000,00	0,00	0,00
		0,00	34.390.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	22.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	18.030.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	66.372.583,00	0,00	0,00
		0,00	65.854.183,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	199.497.143,00	0,00	0,00
		0,00	197.091.773,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	51.404.530,00	0,00	0,00
		0,00	50.102.830,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.941.863.888,00	36.927.147,00	0,00	0,00
		1.931.239.926,00	36.923.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	137.612.200,00	0,00	0,00	0,00
		135.450.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.586.888,00	0,00	0,00	0,00
		118.176.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.011.950,00	36.927.147,00	0,00	0,00
		17.011.950,00	36.923.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.660.652.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.660.601.588,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.567.600,00	0,00	0,00	0,00
		176.952.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.497.500,00	0,00	0,00	0,00
		56.497.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	888.000,00	0,00	0,00	0,00
		343.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.233.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.233.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.505.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.458.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.620.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.823.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.930.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.930.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	533.839.863,00	0,00	0,00	0,00
		531.147.271,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	510.055.663,00	0,00	0,00	0,00
		508.049.871,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	504.826.663,00	0,00	0,00	0,00
		502.820.871,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.229.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.229.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.979.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.297.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.979.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.297.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.805.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.799.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.805.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.799.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	205.814.505,00	58.637.378,00	0,00	0,00
		204.050.554,00	58.637.378,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	109.886.251,00	0,00	0,00	0,00
		108.122.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.290.808,00	0,00	0,00	0,00
		33.954.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.519.698,00	0,00	0,00	0,00
		3.277.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.075.745,00	0,00	0,00	0,00
		70.890.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.927.076,00	53.804.378,00	0,00	0,00
		80.927.076,00	53.804.378,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	28.427.076,00	53.804.378,00	0,00	0,00
		28.427.076,00	53.804.378,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.001.178,00	0,00	0,00	0,00
		15.001.178,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.001.178,00	0,00	0,00	0,00
		15.001.178,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim	0,00	4.833.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.833.000,00	0,00	0,00
7.01.03.7.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	0,00	4.833.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.833.000,00	0,00	0,00
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	1.229.180.157,00	0,00	0,00	0,00
		1.226.051.937,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.229.180.157,00	0,00	0,00	0,00
		1.226.051.937,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	88.163.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.992.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.821.398,00	0,00	0,00	0,00
		2.821.398,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1.138.195.759,00	0,00	0,00	0,00
		1.135.238.039,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	328.175.105,00	0,00	0,00	0,00
		327.313.016,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	328.175.105,00	0,00	0,00	0,00
		327.313.016,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	88.359.289,00	0,00	0,00	0,00
		88.300.335,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	112.568.890,00	0,00	0,00	0,00
		112.118.487,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.924.980,00	0,00	0,00	0,00
		74.704.044,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		11.960.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.771.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.771.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.833.336,00	0,00	0,00	0,00
		31.765.550,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.717.610,00	0,00	0,00	0,00
		5.693.400,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	33.701.009.643,00	24.165.000,00	0,00	0,00
		4.802.333.899,00	24.150.000,00	0,00	0,00
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	33.701.009.643,00	24.165.000,00	0,00	0,00
		4.802.333.899,00	24.150.000,00	0,00	0,00
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.068.902.800,00	24.165.000,00	0,00	0,00
		997.102.550,00	24.150.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.716.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.516.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.017.300,00	0,00	0,00	0,00
		9.817.300,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.000.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.144.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.144.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.554.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.554.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.284.750,00	0,00	0,00	0,00
		109.643.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.021.050,00	0,00	0,00	0,00
		91.380.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.001.700,00	0,00	0,00	0,00
		5.001.700,00	0,00	0,00	0,00





KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.820.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.442.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.442.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.009.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.004.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.009.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.004.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.139.707,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.308.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.832.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.831.707,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.181.750,00	24.165.000,00	0,00	0,00
		496.323.943,00	24.150.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.022.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	24.165.000,00	0,00	0,00
		0,00	24.150.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.093.250,00	0,00	0,00	0,00
		154.087.550,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.275.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.449.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.505.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.276.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.259.693,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.474.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.494.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.980.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	1.250.679.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.540.609,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.250.679.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.540.609,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	895.815.500,00	0,00	0,00	0,00
		885.614.571,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	354.864.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.926.038,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	30.249.148.443,00	0,00	0,00	0,00
		1.594.541.938,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.249.148.443,00	0,00	0,00	0,00
		1.594.541.938,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.249.148.443,00	0,00	0,00	0,00
		1.594.541.938,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	162.685.500,00	0,00	0,00	0,00
		162.682.920,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	162.685.500,00	0,00	0,00	0,00
		162.682.920,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	162.685.500,00	0,00	0,00	0,00
		162.682.920,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	924.667.400,00	0,00	0,00	0,00
		915.539.882,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	924.667.400,00	0,00	0,00	0,00
		915.539.882,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	372.841.400,00	0,00	0,00	0,00
		364.091.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	551.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		551.448.682,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	44.926.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.926.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	44.926.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.926.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.926.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.926.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	852.593.387.367,00	272.098.867.609,00	9.558.656.879,00	457.754.119.920,00
		728.592.793.890,40	243.948.650.092,00	0,00	464.439.321.367,00

Telukdalam, 08 Maret 2024

**BUPATI NIAS SELATAN**

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH.

